



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI**

**RISALAH
RAPAT PARIPURNA**



Dalam Rangka :

**PENJELASAN RANPERDA INISIATIF DPRD
DAN PENJELASAN 2 (DUA) RANPERDA DARI EKSEKUTIF
SERTA PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD**

Tanggal 30 Juni dan 01 Juli 2025

Dihimpun Oleh :

*Bagian Persidangan dan Perundang - undangan
Sekretariat DPRD Kabupaten Ngawi*

Tahun 2025



RISALAH

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Tanggal : 30 Juni 2025

Dalam Rangka

**PENJELASAN RANPERDA INISIATIF DPRD
DAN PENJELASAN 2 (DUA) RANPERDA DARI EKSEKUTIF
SERTA PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD**



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGAWI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Telp / Fax. 0351-744275 Ngawi



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 09 Ngawi Kode Pos 63211

RISALAH RAPAT PARIPURNA

- HARI, TANGGAL** : Senin, 30 Juni 2025.
PUKUL : 09.15 Wib s/d selesai.
TEMPAT : Aula Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi.
I. JENIS RAPAT : Paripurna.
II. SIFAT RAPAT : Terbuka.
III. ACARA RAPAT : Penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD Dan Penjelasan 2 (Dua)
Ranperda Dari Esekutif Sera Pandangan umum Fraksi - Fraksi DPRD.

IV. PIMPINAN RAPAT :

1. Nama : Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M..
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.
2. Nama : H. KHOIRUL ANAM MU'MIN, S.H., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.
3. Nama : IMAM NASRULLOH, S.E., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi

V. SEKRETARIS RAPAT :

1. Nama : Drs. JOKO SUMARYADI, M.H..
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Ngawi
2. Nama : UMMU BAYYINAH, S.P., M.Si.
Jabatan : Kabag Persidangan dan Perundangan - undangan
3. Nama : ARIES SUSILO, S.H., M.M..
Jabatan : Perisalah Legislatif Ahli Muda.

VI. PESERTA SIDANG / RAPAT :

a. Anggota DPRD Kabupaten Ngawi :

• JUMLAH ANGGOTA :

1. Fraksi PDI Perjuangan	: 20 Orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 6 Orang
3. Fraksi Partai Gerindra	: 5 Orang
4. Fraksi Partai Golkar	: 5 Orang
5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA	: 4 Orang
6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT	: <u>4 Orang</u> +
Jumlah	: 44 Orang

• JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :

1. Fraksi PDI Perjuangan	: 15 Orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	: 6 Orang
3. Fraksi Partai Gerindra	: 5 Orang
4. Fraksi Partai Golkar	: 4 Orang
5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA	: 2 Orang
6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT	: <u>4 Orang</u> +
Jumlah	: 36 Orang

YAITU :

1. Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M.	25. H. KALAM, S.H.
2. H. KHOIRUL ANAN MUMIN, S.H. M.H.I	26. WIWIK PRIYANI
3. IMAM NASRULLOH, S.E.	27. H. ANAS HAMIDI, S.H.
4. -	28. SUNTORO
5. EKO TRIYANTO, S.E., M.M.	29. DWI NURACHMAD RIYADI BASUKI
6. Hj WIWIK HARIYANTI	30. ERNING YULI ASNUNIK
7. HELMI MASULIN, S.H.	31. YUDHO ARI SAPUTRO
8. -	32. RISKI WAHYU NUGTOHO, S.Kom/
9. SUNARJATI	33. SARJONO, S.Pd.
10. SOJO	34. Drs.H. AMIN SUNARTO, M.Si.
11. INAYA AMALYA SALMA	35. -
12. -	36. SUPRIANTO
13. PUJO WAHONO	37. Hj HANANI MUHAROMAH
14. -	38. NUR KHOLIS. S/Pd. Si.
15. SUJI ASTUTIK, S.Pd.	39. -
16. H. ARIS SULAWAN	40. -
17. AGENG REZKINA PRAMESTI, S.I.Kom.	41. SUPENO, S.Pd. M.M.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 18. DIANDRA NOVY WINALDA, S.H. | 42. Dr. H. GUNADI ASH CIDIQ, S.PD., M.PD. |
| 19. TRI SUPRIH WARDOYO, S.E. | 43. H. HARIS AGUS SUSILO, S.H. |
| 20. - | 44. AROFIK, S.M. |
| 21. Drs. SOERADJI, M.M.H. | |
| 22. ANDRI RAGIL LESTARI, S.Pd., M.H. | |
| 23. NURI KARIMATUNNISA, S.Si. | |
| 24. H. SUROJOGO PBSH, S.E. | |

• **JUMLAH YANG TIDAK HADIR :**

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 1. Fraksi PDI Perjuangan | : 5 Orang |
| 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | : 0 Orang |
| 3. Fraksi Partai Gerindra | : 0 Orang |
| 4. Fraksi Partai Golkar | : 1 Orang |
| 5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA | : 2 Orang |
| 6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT | : <u>0 Orang</u> + |
| Jumlah | : 8 Orang |

YAITU :

- | | |
|---------------------------------------|------------------------------|
| 1. FELIGIA AGIT HENDIADAI, S.H., M.H. | 5. BAMBANG SRI SALOKO, S.Si. |
| 2. ARIEF SLAMET PRASETYO, S.Kep. | 6. H. WINARTO, S.H. |
| 3. H. SUDIRMAN, S.Sos., M.M. | 7. H. HARYANTO, S.IP., M.M. |
| 4. HERY KUSNINDAR. | 8. SRI HARYANTININGDIH, S.E. |

b. Turut Hadir / Undangan :

1. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi;
 2. Sdr. Sekda Kabupaten Ngawi;
 3. Sdr. Staf Ahli Bupati Setda Kabupaten Ngawi.
 4. Sdr. Asisten Sekda Kabupaten Ngawi;
 5. Sdr. Inspektorat Kabupaten Ngawi;
 6. Sdr. Kepala Dinas / Bagian / Badan / Kantor di Kabupaten Ngawi;
 7. Sdr. Camat se - Kabupaten Ngawi;
 8. Sdr. Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua PKK Kabupaten Ngawi.
-

VII. JALANNYA RAPAT :

ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAH WABARAKATUH,

SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,

SHALOM,

OM SWAATYASTU,

NAMO BUDDHAYO, SALAM KEBAJIKAN

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Ngawi;

Ykh. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ngawi;

Ykh. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi;

Ykh. Sdr. Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Dinas, Badan, Bagian, Kantor, dan Direktur Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi serta Camat se - Kabupaten Ngawi;

Ykh. Sdr. Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua PKK Kabupaten Ngawi.
Rekan - rekan Wartawan serta Undangan lainnya yang kami hormati.

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan ridlo - Nya, kita pada hari ini dapat hadir untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Ngawi beserta staf dan hadirin yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada Rapat Paripurna DPRD hari ini.

HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

Sesuai catatan daftar hadir yang kami terima dari Sekretariat DPRD, dari 44 orang Anggota DPRD sudah hadir 36 orang, yang belum hadir 8 orang, sehingga Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi quorum.

Dengan mengucapkan “ ***Bismillaahirrohmaanirrohiim*** ” Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi dalam rangka Penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD dan Penjelasan 2 (Dua) Ranperda Dari Eksekutif Serta Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketok Palu 3 X

HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

Rapat Paripurna hari ini akan membahas 2 (Dua) Ranperda dari Eksekutif dan Ranperda Inisiatif DPRD yang terdiri atas :

RANPERDA DARI EKSEKUTIF :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 - 2029.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi.

RANPERDA INISIATIF DPRD :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Sebelum jadwal dan susunan acara Rapat Paripurna DPRD ini kami bacakan, kami menyampaikan terima kasih kepada segenap Anggota DPRD Kabupaten Ngawi yang telah mengusulkan Ranperda Inisiatif, juga kepada anggota Pansus beserta Tim Eksekutif yang telah lebih dulu membahas Ranperda dimaksud, yang kesemuanya itu adalah dalam rangka mewujudkan Peraturan Daerah yang dapat diterima oleh semua pihak dan dapat mendukung perkembangan dinamika masyarakat serta mewujudkan peningkatan pelayanan masyarakat kearah yang lebih baik, sehingga harapan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Ngawi dapat terwujud.

Adapun jadwal dan susunan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi, adalah sebagai berikut :

1. Hari Senin, Tanggal 30 Juni 2025 :

- Penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- Pengantar Penjelasan Bupati Terhadap 2 (Dua) Ranperda dari Eksekutif dan Pendapat Bupati Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD.
- Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD terhadap 2 (Dua) Ranperda dari Eksekutif.

2. Hari Selasa, Tanggal 01 Juli 2025 :

1. Tanggapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Pendapat Bupati tentang Ranperda Inisiatif DPRD.
2. Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD dan Persetujuan Bupati terhadap Ranperda Inisiatif DPRD
3. Laporan Panitia Khusus Terhadap 2 (Dua) Ranperda dari Eksekutif.
4. Pengambilan Keputusan.
5. Penandatanganan Berita Acara dan Surat Keputusan.
6. Sambutan Bupati Ngawi
7. Penutup

Demikian jadwal dan susunan acara yang akan kita laksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD yang kita mulai hari ini .

" Acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. "

CATATAN PEMBAWA ACARA :

- Pengantar Penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD disampaikan oleh Ketua Bapemperda olehsaudara Dr. H. Gunadi Ash Cidiq, S.Pd., M.Pd.
- Penjelasan Bupati Terhadap 2 (Dua) Ranperda dari Eksekutif dan Pendapat Bupati Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD disampaikan oleh Bupati Ngawi saudara Ony Anwar Harsono, S.T. ,M.H.

PIMPINAN RAPAT :

HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

Demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD dilanjutkan Penjelasan 2 (Dua) Ranperda dari Eksekutif dan pendapat Bupati terhadap Ranperda Inisiatif DPRD, untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada Bupati dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG KAMI HORMATI

Acara Rapat Paripurna selanjutnya adalah Penyampaian Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD sebagai tanggapan terhadap Pengantar Penjelasan 2 (Dua) Ranperda dari Eksekutif.

Oleh karena itu sebelumnya kami tanyakan kesiapan dari masing -masing fraksi :

1. Apakah Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa sudah siap ?
2. Apakah Fraksi Partai Gerindra sudah siap ?

3. Apakah Fraksi Partai Golkar sudah siap ?
4. Apakah Fraksi Gabungan (PKS - Hanura) sudah siap ?
5. Apakah Fraksi Gabungan (PAN - Demokrat) sudah siap ?
6. Apakah Fraksi PDI Perjuangan sudah siap ?

Terima kasih ke - 6 Fraksi sudah siap.

" Acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara."

CATATAN PEMBAWA ACARA :

Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD disampaikan oleh masing - masing juru bicara Fraksi :

1. *Pandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan oleh saudara H. Anas Hamidi, S.H.*
2. *Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra disampaikan oleh saudara Erning Yuli Asnunik.*
3. *Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar disampaikan oleh saudara Supriyanto.*
4. *Pandangan Umum Fraksi Gabungan (PKS - Hanura) disampaikan oleh saudara Hj. Hanani Muharomah.*
5. *Pandangan Umum Fraksi Gabungan (PAN - Demokrat) disampaikan oleh saudara Supeno, SPd., M.M.*
6. *Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan disampaikan oleh saudara Diandra Novy Winaldi, S.H.*

PENUTUP RAPAT :

HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT

Demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian Pandangan Umum oleh ke - 6 Fraksi, yang mana semua Fraksi dapat menerima materi Rapat untuk dibahas dalam Rapat - Rapat selanjutnya, dengan disertai saran, usul, himbauan dan pertanyaan, untuk itu kami sampaikan terima kasih kepada semua fraksi atas penyampaian Pandangan Umumnya.

Adapun jawaban atas usul, himbauan dan pertanyaan dari Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD tersebut akan disampaikan oleh saudara Bupati Ngawi pada Rapat Paripurna DPRD hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025.

Demikian pula terhadap Pendapat Bupati atas Ranperda Inisiatif DPRD akan diberikan tanggapan oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Ngawi, pada Rapat Paripurna DPRD hari Selasa tanggal 01 Juli 2025.

HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT

Dengan telah selesainya penyampaian Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD, maka selesai sudah Rapat Paripurna DPRD hari ini, untuk itu atas nama Pimpinan dan segenap Anggota DPRD mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Ngawi beserta staf dan undangan yang telah berkenan hadir mengikuti jalannya Rapat Paripurna DPRD dengan tertib.

Marilah kita akhiri Rapat Paripurna DPRD ini bersama - sama dengan mengucapkan Hamdallah. -- ***Alhamdulillahirobbil'aalamiin.*** --

Dengan ini Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi pada hari Senin, tanggal 30 Juni 2025 kami nyatakan ditutup.

Ketok Palu 3x

TERIMA KASIH.

WASSALAAMU`ALAIKUM WR. WB.

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI



Dr. Y. WONO KARTIKO, S.E., M.M.

SEKRETARIS DPRD KAB. NGAWI



Drs. JOKO SUMARYADI, M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19670927 199303 1 008



**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI**

**PENGANTAR / PENJELASAN RANCANGAN PERDA
INISIATIF DPRD KABUPATEN NGAWI
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Ngawi

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan segenap Anggota DPRD Kabupaten Ngawi;

Yang kami hormati Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi atau yang mewakili;

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekda, Inspektur, Direktur, Kepala Dinas, Badan, Bagian, Camat se Kabupaten Ngawi.

Yang kami hormati rekan-rekan Wartawan, serta hadirin undangan yang berbahagia.

Pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas Berkah, Rahmat, Taufiq dan Hidayah-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bertemu pada rapat paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal afiat. Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan Pengantar / penjelasan Rancangan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi.

Terlebih dahulu perlu kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah yang kita Paripurnakan hari ini adalah Ranperda yang telah dibahas pada tahun 2023 yang lalu. Namun hasil Fasilitasi dari Gubernur terhadap Ranperda inisiatif DPRD baru selesai pada tahun 2025 ini, maka baru pada saat ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna untuk mengesahkan Rancangan Perda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang merupakan Inisiatif dari Komisi III DPRD Kabupaten Ngawi Tahun 2023.

Hadirin, Rapat Dewan yang terhormat,

Investasi atau Penanaman modal merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di daerah yang semakin Sejahtera.

Pemerintah Daerah bersama-sama dengan pemangku kepentingan, baik swasta maupun pemerintah harus lebih fokus dalam pengembangan peluang potensi daerah, dalam koordinasi promosi dan pelayanan penanaman modal, terutama dalam melaksanakan urusan penanaman modal (urusan wajib) berdasarkan asas otonomi daerah dan pembantuan atau dekonsentrasi. Oleh karena peningkatan koordinasi antar lembaga tersebut harus dapat diukur dari kecepatan dan ketepatan dalam pemberian pelayanan dibidang penanaman modal terutama pelayanan di bidang perizinan.

Syarat utama berkembangnya investasi di daerah adalah adanya iklim investasi yang sehat dan kondusif. Persyaratan utama dari iklim investasi seperti itu adalah tidak adanya ekonomi biaya tinggi atau banyaknya pungutan yang dilakukan daerah. Dalam hal ini kebijakan di daerah harus *business friendly* terhadap dunia usaha dan lebih mengedepankan pentingnya jumlah investasi yang masuk.

Konsep pro investasi adalah konsep untuk mempermudah segala layanan dan perijinan investasi serta dalam rangka pengembangan sistem "*one stop service*" dan membuka pusat informasi investasi atau "*information centre*", serta didukung dengan peningkatan infrastruktur yang memadai. Diharapkan dengan penerapan konsep pro investasi secara terpadu dapat meningkatkan jumlah realisasi investasi di Kabupaten Ngawi dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja seluas-luasnya

Beberapa kendala yang dihadapi investor dalam menanamkan modalnya di daerah serta terbentuknya kondisi / iklim investasi yang kompetitif adalah belum adanya kebijakan atau Peraturan Daerah di bidang penanaman modal yang komprehensif. Perda terkait Penanaman Modal diharapkan dapat membuka dan memberi kesempatan berusaha dengan kepastian hukum yang lebih kuat.

Pengaturan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 278 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan Daerah, penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat memberikan Insentif dan/atau Kemudahan kepada masyarakat dan/atau Investor yang diatur dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka DPRD Kabupaten Ngawi sesuai dengan fungsi yang dimiliki khususnya pembentukan Perda menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Demikian tadi pengantar penjelasan Rancangan Peraturan Daerah inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi. Selanjutnya kami berharap Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sekian terima kasih,

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Ngawi, 30 Juni 2025

Ketua Bapemperda DPRD Kab. Ngawi



Dr. H. GUNADI ASH CIDIQ, S.Pd. M.Pd.



BUPATI NGAWI

PENJELASAN DAN PENDAPAT BUPATI NGAWI

PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NGAWI

TANGGAL 30 JUNI 2025

ASSALAMU'ALAIKUMWARAHMATULLAHI WABARAKATUH
SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

- YTH. BAPAK KETUA, WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN NGAWI BESERTA ANGGOTA;
- . FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI;
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
BESERTA JAJARANNYA;
- . KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DAN CAMAT SE KABUPATEN NGAWI;
- HADIRIN DAN SEGENAP TAMU UNDANGAN YANG
BERBAHAGIA.

PUJI SYUKUR KITA PANJATKAN KEHADIRAT ALLAH YANG MAHA KUASA, KARENA ATAS RAHMATNYA KITA SEKALIAN DAPAT MENGIKUTI RAPAT PARIPURNA PADA PAGI HARI INI DALAM KEADAAN SEHAT WALAFIAT.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

MELALUI RAPAT PARIPURNA INI, PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI MENGAJUKAN 2 (DUA) RANPERDA YAITU :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029;DAN
2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

PEMERINTAH DAERAH DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN FUNGSINYA MEMERLUKAN PERENCANAAN JANGKA PANJANG, JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN YANG SECARA SUBSTANSI SALING BERKAITAN DAN MAMPU MENJADI ACUAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MERUPAKAN PONDASI DASAR YANG MENJADI PIJAKAN DAERAH DALAM MELAKUKAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN AGAR MAMPU MELAKUKAN PENCAPAIAN YANG LEBIH BAIK SERTA MENYASAR SELURUH ASPEK KEHIDUPAN MASYARAKAT.

DALAM MENYUSUN PIJAKAN DAERAH TERSEBUT DIPERLUKAN STRATEGI YANG SISTEMATIS DAN TERENCANA DENGAN MEMANFAATKAN BERBAGAI SUMBER DAYA YANG TERSEDIA SECARA OPTIMAL. EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL.

BERDASAR UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL STRATEGI TERSEBUT TERTUANG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SALAH SATUNYA ADALAH RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH YANG MERUPAKAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH UNTUK PERIODE 5 (LIMA) TAHUNAN YANG BERISI PENJABARAN DARI VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH YANG BERPEDOMAN PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL.

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH MEMILIKI KEDUDUKAN DAN FUNGSI STRATEGIS DALAM PEMBANGUNAN DAERAH, KARENA SEBAGAI PENENTU ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN UNTUK MEWUJUDKAN VISI PEMBANGUNAN DAERAH, KARENA KEDUDUKAN DAN FUNGSI TERSEBUT MAKA PERLU MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029.

HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RESIKO SEBAGAI PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG MENGATUR MENGENAI PENYEDERHANAAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI PENERAPAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MERUPAKAN METODE STANDAR BERDASARKAN TINGKAT RISIKO SUATU KEGIATAN USAHA DALAM MENENTUKAN JENIS PERIZINAN BERUSAHA SERTA KUALITAS PENGAWASAN. PERIZINAN BERUSAHA DAN

PENGAWASAN MERUPAKAN INSTRUMEN PEMERINTAH DALAM MENGENDALIKAN SUATU KEGIATAN USAHA.

PENDEKATAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MEMERLUKAN PENYESUAIAN TATA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN LAYANAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI PROSES BISNIS PERIZINAN BERUSAHA DALAM SISTEM PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SINGLE SUBMISSION*), MELALUI SISTEM INI PELAKSANAAN PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA DAPAT LEBIH EFEKTIF SERTA PENGAWASANNYA MENJADI LEBIH TERSTRUKTUR.

DENGAN ADANYA SISTEM PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK TERSEBUT MAKA PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI SUDAH TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEHINGGA PERLU UNTUK DICABUT.

RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT,

PADA KESEMPATAN INI KAMI JUGA MENYAMPAIKAN PENDAPAT TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YAITU RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

KAMI SANGAT MENGAPRESIASI ADANYA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT KARENA INVESTASI MERUPAKAN FAKTOR PENDUKUNG PEREKONOMIAN, INVESTASI INI HARUS SENANTIASA DIDORONG SALAH SATUNYA MELALUI PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI YANG BERTANGGUNG JAWAB BAGI MASYARAKAT DAN/ATAU PENANAM MODAL YANG AKAN BERINVESTASI DI KABUPATEN NGAWI

KAMI BERHARAP DENGAN DITETAPKANNYA PERATURAN DAERAH INI AKAN DAPAT MENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN NGAWI, MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI, MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH, MENDORONG EKONOMI KERAKYATAN, MELINDUNGI USAHA NASIONAL DAN INDUSTRI DALAM NEGERI SERTA MEMBANTU INVESTOR DALAM PERSIAPAN PRODUKSI KOMERSIAL SEHINGGA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN NGAWI DAPAT TERWUJUD.

DEMIKIAN BEBERAPA HAL YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, MUDAH – MUDAHAN PENJELASAN SINGKAT ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH YANG DIAJUKAN INI DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN MENGENAI PERATURAN DAERAH YANG KAMI AJUKAN, DENGAN HARAPAN DEWAN YANG TERHORMAT MEMBERIKAN PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TERSEBUT. DAN PENDAPAT ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF YANG
KAMI SAMPAIKAN DAPAT MEMBAWA MANFAAT UNTUK
KITA SEMUA.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA
SEMOGA ALLAH SWT SENANTIASA MERIDHOI USAHA
KITA DAN SELALU MEMBERIKAN PETUNJUK DAN
BIMBINGAN KEPADA KITA SEKALIAN. AMIIN.

WASSALAMU'ALAIKUM WR . WB.

BUPATI NGAWI,



H. ONY ANWAR HARSONO



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Memela Rakyat

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN NGAWI
Terhadap
RANPERDA RPJMD TAHUN 2025 – 2029 SERTA
RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA
JASA KONSTRUKSI



Disampaikan pada Sidang Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi
Kamis, 30 JUNI 2025
JUBIR : H. ANAS HAMIDI, SH

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jln. JA. Suprpto No.9 Ngawi Tlp. 0351-747661 Fax. 0351-744275

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Sekretariat : Jln. JA. Suprpto No.9 Ngawi Tlp. 0351-747661 Fax. 0351-744275



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Mem bela Rakyat

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN NGAWI
TERHADAP
RANPERDA RPJMD TAHUN 2025 – 2029 SERTA RANPERDA
TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh

*"Alhamdulillahirobbil Ngalamin, wabihi nastanginu Ngala umuriddun-ya
waddin, wassholatu wassalamu Ngala asrofill ambiya'i walmursalin,
sayyidina wahabibina, wasafi'ina, wamaulana Muhammadin, SAW, wangala
alihi washohbihi ajmangin,*

*Labbaik Allahumma Labbaik. Labaika Laa Syarika Laka Labbaik. Innal
Hamda Wan Ni'mata Laka Wal Mulk. Laa Syarika Lak.*

Salam sejahtera bagi kita semua

Yang kami hormati Saudara Bupati Ngawi;

Yang kami hormati Saudara Wakil Bupati Ngawi;

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ngawi;

Yang kami hormati FORPIMDA Kabupaten Ngawi;

Yang kami hormati Para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Ngawi, Tamu Undangan, Rekan Pers, dan Segenap Hadirin semua yang
mengikuti Rapat Paripurna ini yang berbahagia.



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Rakyat

Salam silaturrahim, teriring do'a sernoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua agar kita tetap diberikan kelancaran dalam menjalankan Aktivitas dengan Semangat membela yang Benar, Amin.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat dan semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya. *Amiin*.

HADIRIN RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA

Mengawali penyampaian pandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami haturkan Selamat Datang kembali ke tanah air Para Jama'ah Haji tahun 2025, Semoga menjadi Haji yang Mabruur.

Kedua, menyambut hari jadi Ngawi dan HUT Kemerdekaan Indonesia, maka kami ucapkan "Selamat Hari Jadi Kabupaten Ngawi, dan Selamat menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia TAHUN 2025.

Kita patut bersyukur bahwa NKRI dan Pancasila bagi kami tetap menjadi Harga Mati untuk menggerakkan kita semuanya, menggerakkan persatuan kita dalam mengatasi semua tantangan, menggerakkan rasa kepedulian kita untuk saling berbagi, memperkuat persaudaraan dan kegotongroyongan kita menuju Indonesia maju.



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Mem bela Rakyat

HADIRIN RAPAT DEWAN YANG BERBAHAGIA

Pada kesempatan yang baik ini Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan waktu kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi, Selanjutnya ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada saudara Bupati Ngawi yang telah menyampaikan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Ngawi tentang RPJMD Tahun 2025 – 2029 Serta Ranperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Hadirin Rapat Dewan Yang Berbahagia

Setelah mencermati dan melakukan analisa secara detail dengan waktu yang terbatas, terhadap deskripsi materi Ranperda RPJMD Tahun 2025 – 2029 Serta Ranperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Fraksi PKB memberikan beberapa pertanyaan dan catatan penting sebagai masukan Pemerintah Daerah.

Adapun beberapa pertanyaan dan catatan dari Fraksi PKB sebagai berikut :

1. Fraksi PKB memandang perlu dan mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Ngawi yang telah mengajukan Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029, dan tidak lain merupakan upaya dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Ngawi menjadi lebih baik lagi dalam segala aspek Pembangunan, dapat menyelaraskan program pembangunan dan selanjutnya keputusan program Rencana Jangka Menengah Daerah ini bisa tersusun dengan baik demi kesejahteraan masyarakat.



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Rakyat

2. RPJMD menjadi salah satu ranperda krusial bagi pembangunan, lantaran menjadi semacam grand design, memuat rancangan kerja Kabupaten Ngawi selama 4 tahun ke depan yang wajib memenuhi aspek hingga sesuai kebutuhan masyarakat, mau seperti apa nantinya, harus dibahas secara matang. Fraksi PKB DPRD Ngawi memastikan bakal mengawal ketat penyusunan aturan ini, termasuk dalam penerapannya mendatang.
3. RPJMD bukanlah sekedar dokumen Formal tetapi merupakan manifestasi dari janji politik saudara Bupati yang harus selaras dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN. Yang kemudian dijabarkan kedalam program-program yang terukur dan berorientasi pada hasil yang nyata. RPJMD ini menjadi kompas bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Kabupaten Ngawi sebagai Kabupaten yang membangun kotanya dan membangun desanya sehingga antara kota dan desa bisa maju secara berimbang berkeadilan serta bisa mensejahterakan seluruh masyarakat secara berkelanjutan.
4. Data BPS terbaru menunjukkan bahwa kabupaten ngawi masih tercatat sebagai Daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke enam di Jawa Timur dengan prosentase 13,86% . Angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat Kabupaten Ngawi yang hidup dibawah garis kemiskinan. Meskipun ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk itu bagaimanakah program program strategis yang nyata untuk mengurangi angka kemiskinan tersebut.



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Memblu Rakyat

5. Terhadap Kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi, diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029, sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan yaitu : "KABUPATEN NGAWI SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN", Belanja daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi dan transparan serta akuntabel.
6. Terhadap Perencanaan Kesehatan Sosial Masyarakat, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di tiap Kecamatan kurang layak dan kurang representatif, khususnya TPA di Kecamatan Ngrambe, Jogorogo, Kendal. Jika musim kemarau tiba sampah berhamburan di jalan dan jika musim hujan tiba, bau menyengat kemana-mana. Mohon Pemerintah Daerah merencanakan jangka menengah secara matang untuk membuat TPA yang layak dan representatif di tiap kecamatan.
7. Dalam Penyusunan RPJMD, Mohon Pemerintah Daerah merencanakan dan menginventarisir Pesantren untuk di jadikan mitra dalam mengembangkan pendidikan agama yang humanis dan bisa bersifat toleransi.
8. Fraksi PKB Berharap RPJMD dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah pengangguran, kemiskinan, konflik sosial serta pengentasan kemiskinan.



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Memela Rakyat

9. FPKB menyarankan agar pemerintah Kabupaten Ngawi memberikan perhatian husus terhadap :
- Sektor pertanian dari mulai saprodi (sarana produksi) dengan memastikan adanya pupuk subsidi bisa diperoleh dengan mudah pasca panen, menjamin harga yang stabil yang menguntungkan petani baik di musim hujan maupun di musim kemarau.
 - Sektor pendidikan program pendidikan wajib 9 tahun, Harus bisa terlaksana secara mudah dan tidak membebani masyarakat.
 - Sektor kesehatan, pelayanan terhadap pasien harus terus nenerus ditingkatkan secara profesional baik keramahan maupun pelayanan terhadap pasien, tidak membedakan pelayanan tersebut kepada pasien yang menggunakan BPJS dan yang non BPJS.
 - Pembangunan pasar sembung. ?
 - Mohon dinas terkait mengawasi harga gabah watu panen raya. ?
 - Pemasangan penerangan jalan umum di JEMBATAN GEMPOL. ?
 - Mohon Peraturan daerah turunan dari Undang-undang pesantren dapat segera ditindaklanjuti untuk kesejahteraan santri dan anak-anak yatim piatu panti asuhan/LKSA. ?
 - Mohon Saudara Bupati dan Instansi terkati bisa menindaklanjuti. ? dan merevisi peraturan Bupati terkait honor kader yang ditetapkan senilai 100 ribu dirasa kurang. Disini tidak sesuai dengan tugas kader yg semakin lama semakin bertambah tugasnya.
Didalam pelaksanaan posyandu dimana kader masih dibebani biaya pembuatan pmt balita, pmt lansia bersamaan dengan kegiatan pos ILP kader juga masih terbebani banyak pelaporan, kader juga masih masih harus mengeluarkan biaya dulu baru per berapa bulan baru mendapatkan uang ganti PMT. Mohon ditindaklanjuti.



FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Memela Rakyat

Hadirin Rapat Dewan Yang Berbahagia

Setelah melalui Pencermatan, Pembahasan dan Masukan dari berbagai pihak, sebagai kesimpulan awal, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Ngawi bisa menerima Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Ngawi tentang RPJMD Tahun 2025 – 2029 Serta Ranperda Tentang Pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, untuk dibahas lebih lanjut dalam sidang-sidang berikutnya.

Hadirin Rapat Dewan Yang Berbahagia

Demikian Pandangan Umum Fraksi PKB, Atas kesempatan yang diberikan kami sampaikan terima kasih, apabila ada kalimat yang kurang berkenan dihati, atas nama Fraksi PKB kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wallohul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thoriq

Wassalamu Alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Ngawi, 30 Juni 2025

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI



KETUA

NURI KARIMATUNNISA, SSI



PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KABUPATEN NGAWI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH

**OWONO IN H PARK
NGAWI**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENENGAH
DAERAH KABUPATEN NGAWI 2025 - 2029
PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Ngawi, 30 Juni 2025

Sekretariat : Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 09, Kel. Ketanggi - Ngawi
fraksigerindrangawi@gmail.com

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD KABUPATEN NGAWI
TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG**

- 1. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MENENGAH
DAERAH-KABUPATEN NGAWI 2025 – 2029**
- 2. PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

SENIN, 30 JUNI 2025

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA.

Om Swastastu Namo Budaya Salam Kebajikan

**YANG KAMI HORMATI, SAUDARA PIMPINAN RAPAT
PARIPURNA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI,**

YANG KAMI HORMATI SAUDARA BUPATI NGAWI,

YANG KAMI HORMATI SAUDARA WAKIL BUPATI NGAWI,

**YANG KAMI HORMATI SAUDARA ANGGOTA FORUM PIMPINAN
DAERAH KABUPATEN NGAWI,**

**YANG KAMI HORMATI SAUDARA SEKDA DAN SELURUH
PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMKAB NGAWI SERTA CAMAT SE
-KABUPATEN NGAWI,**

**YANG KAMI HORMATI TEMAN-TEMAN MEDIA, LSM, PIMPINAN
ORMAS SERTA UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.**

Mengawali Sidang Dewan yang terhormat ini, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Ngawi 2025 - 2029 dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Semoga kehadiran kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah SWT. Shalawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia menuju jalan kebenaran yang diridhoi oleh Allah SWT...Aamiin.

Dalam kesempatan ini kami Fraksi Partai Gerindra mengucapkan terima kasih kepada Saudara Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Ngawi 2025 - 2029.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah berkenan menyampaikan penjelasan Nota Keuangan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Ngawi 2025 - 2029.

✓ ***Hadirin Rapat Dewan Yang Berbahagia,,,***

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi 2025-2029 merupakan

perencanaan strategis yang berfungsi sebagai panduan pembangunan daerah selama lima tahun. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 5 Ayat 2, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.

Konteks dan Tujuan RPJMD ✓

- ✓ • **Fondasi Pembangunan Daerah:** RPJMD menjadi dasar akselerasi dan transformasi pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.
- ✓ • **Penjabaran Visi-Misi Kepala Daerah:** Dokumen ini mengacu pada RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) dan RPJM Nasional, sesuai amanat UU No. 25/2004 dan UU No. 23/2014.
- ✓ • **Peran Bappeda:** Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memegang peran sentral dalam menyusun strategi, mengoptimalkan sumber daya, dan melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder).

Dokumen Pendekatan Penyusunan RPJMD disusun dengan 4 (empat) pendekatan (berdasarkan Permendagri No. 86/2017) yaitu Teknokratis, Partisipatif, Politis dan Top-Down & Bottom-Up. Tujuan integrasi dari RPJMD

Menjamin konsistensi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan.

Fokus Pembangunan

- **Peningkatan layanan publik** dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
- **Pembangunan berbasis lptek dan inovasi** (sesuai RIPJPID).
- **Sinergi antar-sektor** (ekonomi, infrastruktur, sosial, lingkungan).

Tantangan & Evaluasi

- **Koordinasi multistakeholder** harus kuat untuk menghindari tumpang tindih program.
- **Kesesuaian anggaran** dengan prioritas pembangunan.

Evaluasi berkala untuk memastikan capaian target (indikator kinerja). Dapat disimpulkan bahwa RPJMD Kabupaten Ngawi 2025-2029 adalah dokumen dinamis yang menggabungkan pendekatan teknokratis, partisipatif, dan politis untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Keberhasilannya bergantung pada: Implementasi konsisten oleh OPD terkait, Monitoring dan evaluasi berbasis data dan Kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Hadirin Rapat Dewan Yang Berbahagia,,, ✓

Pembahasan poin tentang Pencabutan PERDA Nomor 18 Tahun 2013 tentang ijin usaha jasa konstruksi yang perlu kita ketahui bahwa PERDA Nomor 18 Tahun 2013 mengatur berbagai aspek terkait perizinan usaha jasa

konstruksi di wilayah Kabupaten Ngawi. Pencabutan Perda ini memiliki konsekuensi serius bagi perusahaan. Dampak yang akan diterima yaitu penghentian operasional, pemutusan hubungan kerja, kerugian reputasi, adanya sanksi tambahan dan Upaya pemulihan setelah pencabutan izin. Pencabutan izin usaha konstruksi ini dapat disebabkan beberapa faktor yaitu, adanya pelanggaran peraturan, tidak memenuhi standar keselamatan, kegagalan memenuhi komitmen dan tidak mengurus perizinan sebagai mana mestinya. Oleh karena itu, Perusahaan harus selalu memastikan kepatuhan terhadap hukum dan regulasi yang berlaku agar operasional bisnisnya dapat berjalan lancar dan berkelanjutan

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia,

Pembahasan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Ngawi 2025 - 2029, maka perkenankan Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Ngawi menyampaikan pendapat, masukan ataupun saran sebagai berikut :

1. Pembangunan infrastruktur harus lebih merata di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi, dengan fokus pada daerah yang selama ini kurang mendapat perhatian.
 - a. Pengadaan lampu jalan dari Desa Selopuro sampai Desa Kalang, karena rawan kecelakaan dan begal.
 - b. Pengadaan lampu jalan Soco Tanjung Sari, karena rawan kecelakaan.

Hadirin Sidang Dewan Yang terhormat,,,

Setelah mencermati dan memahami materi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Ngawi 2025 - 2029, maka Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Ngawi menyatakan : **MENERIMA dan MENYETUJUI** materi Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Ngawi 2025 - 2029 untuk disahkan dan dibahas dalam rapat-rapat berikutnya.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra yang dapat kami sampaikan, dan apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah SWT selalu memberikan bimbingan serta petunjuknya kepada kita semua.

SEKIAN.....

**WASSALAMU'ALAIKUM WARKHMATULLAHI
WABARAKATUH.**

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DPRD KABUPATEN NGAWI**

 
SUNTORO
Ketua

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN NGAWI**

TERHADAP

1. RANPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029
2. RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG USAHA JASA KONTRUKSI



**DISAMPAIKAN PADA
RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NGAWI
SENIN, 30 JUNI 2025**



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN NGAWI
TERHADAP**

- 1. RANPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029**
- 2. RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG USAHA JASA KONTRUKSI**

Senin, 30 Juni 2025

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Yth. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna;

Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil
Bupati; Yang kami hormati segenap Anggota
DPRD

Yang kami hormati Pejabat FORKOMPIMDA atau yang mewakili;
Yang kami hormati Sdr. Sekda, Para staf ahli, Para asisten dan
para Kepala Bagian

Yang Kami Hormati Para kepala OPD, Para Direktur BUMD dan
Camat Se Kabupaten Ngawi

Yang Kami Hormati Sahabat-sahabat dari LSM, Media dan
Segenap Undangan serta hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu
Wata'ala, yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada
kita, sehingga kita dapat bertemu pada acara Rapat Paripurna DPRD
dalam keadaan sehat wal afiat.

Mengawali Pandangan Umum ini, kami sampaikan terimakasih kepada Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Partai Golkar, untuk menyampaikan Pandangan Umum terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Usaha Jasa Kontruksi.

Selanjutnya, kami berterima kasih kepada Sdr.Bupati yang telah menyampaikan Pengantar Penjelasan terhadap 2 (dua) Ranperda usulan pemerintah kabupaten Ngawi. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Panitia Khusus 2 (dua) Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Ngawi, sehingga pada akhirnya sampai pada tahapan pembahasan di Rapat paripurna ini.

Rapat Dewan Yang Terhormat dan hadirin yang kami muliakan, Perencanaan pembangunan daerah merupakan pondasi dasar yang menjadi pijakan daerah dalam melakukan akselerasi serta transformasi pembangunan daerah yang lebih maju, serta mampu melakukan pencapaian yang lebih baik, serta mampu menyasar seluruh aspek dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Arah serta strategi daerah yang diakumulasikan dalam rancangan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen daerah untuk mengubah suatu keadaan yang belum ideal menjadi lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Tujuan disusunnya dokumen RPJMD Kabupaten Ngawi 2025-2029 antara lain:

1. Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, sebagai dasar prioritas penanganan pembangunan daerah 5 (lima tahun) kedepan. Dokumen ini dapat digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah;

2. Merumuskan pedoman pengelolaan terhadap kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan pembangunan daerah;
3. Menetapkan indikator kinerja sebagai dasar penilaian dan evaluasi kinerja tahunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi

Rapat Dewan Yang Terhormat dan hadirin yang kami muliakan,
Mencermati 2 (dua) Ranperda usulan Pemerintah Kabupaten Ngawi tersebut, kami menyampaikan catatan sebagai berikut:

1. Untuk mewujudkan visi, misi bupati dan wakil bupati ngawi yaitu "Semesta Berencana, terwujudnya lumbung pangan nasional yang maju dan berkelanjutan, menuju masyarakat kabupaten Ngawi sejahtera, berakhlak dengan Semangat Gotong Royong." Maka Usulan Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Ngawi tahun 2025-2029 sudah sangat bagus, tersusun secara rinci, terstruktur dan sistematis. Sehingga Sudah sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan PUU sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang Undang No.23 Tahun 2014 serta Perpres nomor 87 Tahun 2014 maupun Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 beserta perubahannya.
2. Mengenai Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Usaha Jasa Kontruksi. Kami setuju dengan pencabutan Perda tersebut, supaya iklim di dunia kontruksi bisa lebih berkembang dan kompetitif, serta dapat mendorong untuk masuknya investor di kabupaten ngawi, serta dapat membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.

Rapat Dewan Yang Terhormat dan hadirin yang kami muliakan,
Sebelum mengakhiri Pandangan Umum Fraksi, Perkenankan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut ;

1. Dalam rangka memastikan target masing-masing indikator kinerja Daerah yang ditetapkan, mohon diperhatikan

kemampuan Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029.

2. Berdasar Gambaran kondisi geografis letak wilayah, Perlu pemerataan pembangunan wilayah, agar tidak terlalu timpang antara wilayah satu dengan wilayah lainnya, terutama antara utara bengawan solo dengan selatan bengawan solo, sehingga manfaat dapat dirasakan oleh masyarakat kabupaten Ngawi secara merata.
3. Pembangunan infrastruktur Desa mohon untuk tetap diperhatikan, disamping pembangunan kepemudaan, seni budaya dan pariwisata Daerah dan Desa.
4. Seiring dengan program wilayah industri di kabupaten Ngawi yang sedang berkembang pesat, maka mohon diperhatikan untuk keseimbangan dengan keberadaan lahan sawah produktif yang sekarang hasil pertanian kabupaten ngawi juga meningkat, bahkan menjadi salah satu penyangga pangan nasional.
5. Untuk menunjang Pertanian ramah lingkungan berkelanjutan, dan menjaga ekosistem lahan pertanian, mohon untuk diberikan bantuan kepada kelompok kelompok tani, diantaranya ;
 - 1.)Pengadaan Rubuha (Rumah Burung Hantu)
 - 2.)Alat Tanam padi, sekarang sangat dibutuhkan untuk percepatan proses tanam.

Rapat Dewan Yang Terhormat dan hadirin yang kami muliakan,

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar pada Rapat Paripurna ini, maka dengan mengucap "Bismillahirrohmanirrohim" Fraksi Partai Golkar **menyetujui** Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Usaha Jasa Kontruksi untuk dibahas dalam rapat-rapat berikutnya.

"Santen Toyone Kelopo, Cekap Semanten Atur Kawulo..."

Sekian dan terima kasih, ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar besarnya.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Ngawi, 30 Juni 2025

Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Ngawi

KETUA

SARJONO, S.Pd

JURU BICARA

SUPRIANTO

PANDANGAN UMUM

FRAKSI GABUNGAN PKS - HANURA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARERAH KABUPATEN NGAWI

TERHADAP

- 1. RANPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN
2025 – 2029**
- 2. RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**



**Disampaikan pada
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi
Ngawi, 30 Juni 2025
Juru Bicara : HANANI MUHAROMAH**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Ngawi

Yang terhormat Pimpinan DPRD Kabupaten Ngawi & seluruh Anggota DPRD

Yang kami hormati Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi

Bapak/Ibu Saudara Anggota DPRD Kabupaten Ngawi kami hormati,

Saudara sekretaris DPRD yang kami hormati beserta seluruh jajarannya

Bapak/ibu Kepala OPD yang kami hormati, Camat se kab. Ngawi

Rekan-Rekan Pers, LSM, dan seluruh warga masyarakat Ngawi yang mengikuti yang kami hormati.

Alhamdulillahirobbilalamin, Puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah Subhaanahu wa ta'aala, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan Nikmat, Rahmat dan Karunia-Nya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersama hadir baik secara langsung di Aula DPRD ini, dalam acara RAPAT PARIPURNA :

1. RANPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 – 2029
2. RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Sholawat beriring salam kami sampaikan kepada Pemimpin akhir zaman, Muhammad SAW yang telah membawa contoh teladan kepada semua umat manusia. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu meneladani kepemimpinan beliau untuk kemaslahatan umat di muka bumi. Amin ya robbal 'alamin.

Hadirin, Rapat Dewan yang kami hormati

RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode lima tahunan yang merupakan penjabaran dari visi misi Kepala Daerah terpilih, yang memuat kondisi daerah, strategi, arah, kebijakan program pembangunan yang mengacu pada kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2029. Dokumen publik ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang lebih optimal serta merupakan akuntabilitas publik pemerintah daerah. RPJMD juga merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), yang dijadikan rujukan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berisi indikator kinerja yang akan dicapai dan dijadikan acuan dalam penyusunan kegiatan oleh SKPD dalam setiap tahunnya. Untuk itu, mengingat betapa krusial fungsi dari RPJMD 2025-2029 menjadi rujukan pembangunan 5 tahun maka dibutuhkan kemauan dan kemampuan politik dari seluruh pemangku kepentingan dalam mencermati agar nantinya dapat direalisasikan dan dirasakan dampak pembangunannya secara nyata oleh masyarakat di Kabupaten Ngawi.

Berdasarkan telaah dan kajian yang kami lakukan terkait Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Fraksi Gabungan PKS – Hanura merespon cita-cita Kabupaten Ngawi untuk 5 tahun ke depan yang dinyatakan dalam visi dan misi nya yaitu *"Terwujudnya Lumbung Pangan yang Maju, Mandiri, dan Berkelanjutan Menuju Masyarakat Kabupaten Ngawi yang Sejahtera, Berakhlak dengan Semangat Gotong Royong."* Tema tersebut sudah semestinya diikuti dengan komitmen

Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam mengembangkan sektor unggulan, khususnya pertanian, sebagai kekuatan ekonomi lokal yang dapat menopang kemandirian dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. ini dimaknai bahwa pembangunan dilaksanakan secara dinamis dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Ngawi dengan mengelola potensi yang dimiliki secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan.

2. Fraksi Gabungan PKS - Hanura berharap Pemerintah Kabupaten Ngawi akan mampu menjaga konsistensi pembangunan dalam jangka panjang, dengan tetap berpedoman pada visi-misi tersebut.
3. Fraksi Gabungan PKS – Hanura berharap, Perencanaan pembangunan daerah menjadi upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
4. Pembangunan adalah sesuatu yang identik dengan perkembangan dan pertumbuhan. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang memunculkan inovasi-inovasi pemikiran, paradigma tentang pembangunan pun menjadi tidak lagi konvensional. Kami berharap Adanya upaya dalam meningkatkan nilai-nilai moral dan etika masyarakat Ngawi yang tetap dijaga seiring dengan perkembangan dan modernisasi yang terjadi.
5. Fraksi Gabungan PKS - Hanura juga mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan Upaya Ter-integrasi dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Juga respon cepat atas apa yang menjadi sumber keluhan masyarakat seperti persoalan sampah, infrastruktur, keamanan lingkungan yang kerap menimbulkan implikasi terhadap masalah-masalah sosial dan hukum.

Rapat Dewan dan hadirin yang kami hormati,

Berkaitan dengan Ranperda pencabutan Perda Nomor 18 tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Fraksi Gabungan PKS – Hanura menyatakan tidak ada catatan.

Berkaitan dengan Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, Fraksi Gabungan PKS – Hanura menyatakan tidak ada catatan.

Dengan mengucap *bismillahirrohmanirohim*, kami Fraksi Gabungan PKS – Hanura menyetujui kedua ranperda tersebut untuk dibahas dalam rapat rapat selanjutnya.

Hadirin yang kami hormati,

Demikianlah pandangan umum ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Kami juga memohon maaf apabila dalam penyampaian Pandangan Umum Fraksi ini terdapat kekhilafan atau kesalahan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ngawi, 30 Juni 2025

Fraksi Gabungan PKS - HANURA

DPRD Kabupaten Ngawi

Ketua Fraksi



HANANI MUHAROMAH



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI GABUNGAN PAN-DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN NGAWI**

Terhadap

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029 DAN PENCABUTAN PERDA
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Disampaikan pada :
Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi
Hari, Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Juru Bicara : Supeno, S.Pd., M.M.



**FRAKSI GABUNGAN PAN-DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI**

Sekretariat : Lt.3 Gedung DPRD, Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 09 Ngawi
Telp. 0351-747661 Fax. 0351-744275, Email : fraksigabungan.dprdngawi@gmail.com



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI GABUNGAN PAN-DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN NGAWI**

Terhadap

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029 DAN PENCABUTAN PERDA
NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.

Y T H. Sdr. Pimpinan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi;

Y K H. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Ngawi;

Y K H. Sdr. Anggota FORPIMDA Kabupaten Ngawi;

Y K H. Sdr. Sekretaris Daerah beserta Pejabat Pemerintah Kabupaten Ngawi;
dan Rekan-rekan anggota DPRD, segenap undangan, serta hadirin
yang berbahagia.

Mengawali pandangan umum ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat *Allah SWT*, yang telah melimpahkan rahmad, nikmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi dalam keadaan sehat *wal'affiat*. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga kita termasuk umat yang kelak mendapat syafa'atnya.... *aamiin*.

Kepada Pimpinan Rapat, kami mengucapkan terimakasih atas kesempatan yang diberikan kepada Fraksi Gabungan PAN-DEMOKRAT untuk menyampaikan Pandangan Umum. Terimakasih juga kepada saudara Bupati, yang telah menyampaikan Pengantar atas Ranperda tersebut, dan juga kepada Panitia Khusus (Pansus) beserta Tim Eksekutif yang telah memberikan pemikiran, pendapat, usul serta saran sehingga dapat memberi gambaran kepada kami dalam menyampaikan pandangan terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029, dan Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

DPRD telah membentuk Pansus untuk membahas Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029. Terhadap Ranperda tersebut, Fraksi Gabungan PAN-DEMOKRAT berpandangan bahwa secara umum rancangannya sistematis, akademis, idealis dan realistis. Selanjutnya tinggal bagaimana entitas pembangunan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan mampu memahami, menerjemahkan serta mengimplementasikan Visi-Misi ke arah kondisi Ngawi yang ingin dicapai sampai akhir periode. Visi RPJMD Tahun 2025-2029, diawali dengan *diksi* yang sama seperti periode sebelumnya, yaitu *"SEMESTA BERENCANA"*. Sedangkan substansinya pada : *"Lumbung Pangan Nasional, Maju, Mandiri, Berkelanjutan, Sejahtera, Berakhlak, dan Semangat Gotong Royong"*.

Sejak tahun 2021, Ngawi dikenal sebagai lumbung pangan nasional. Peran Ngawi sangat signifikan dalam mendukung ketahanan pangan. Produksi padi yang tinggi dan surplusnya beras menjadikan Ngawi sebagai penyangga kebutuhan pangan nasional. Tetapi ironisnya, hasil identifikasi isu strategis dalam Rancangan RPJMD yaitu untuk urusan pangan, terdapat masalah : *"ketersediaan pangan bagi masyarakat masih belum optimal; potensi kerawanan pangan masih ada; Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) belum sesuai ketentuan peraturan perundangan; dan masih tingginya desa rawan pangan"*. Artinya distribusi keadilan keuntungan belum merata, karena sebagian warga Kabupaten Ngawi masih ada potensi kekurangan pangan di tengah statusnya sebagai lumbung pangan nasional.

Pada urusan penanaman modal, terdapat isu strategis terkait masalah : *"rendahnya minat investor; belum adanya kepastian hukum; proses pelayanan penanaman modal masih kurang efektif; kurangnya data dan informasi potensi daerah yang dibutuhkan pelaku usaha; belum selarasnya peraturan perizinan pusat dan daerah; dan investor belum mengetahui tentang keuntungan investasi di Ngawi"*. Tetapi faktanya investor sudah banyak yang masuk Kabupaten Ngawi.

Kami berpandangan bahwa kedepan Urusan Pertanian dan Pangan, serta Penanaman Modal dan Industri akan menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam hal infrastruktur, tata ruang dan wilayah, Kawasan Industri, Pelayanan perizinan dan fasilitasi, serta pengelolaannya.

Kami juga mencermati isu strategis masalah sumber daya manusia (SDM) baik pelaksana program maupun objek program pembangunan. Masalah SDM akan menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan Visi : "*Maju, Mandiri, Berkelanjutan, Sejahtera, dan Berakhlak*". Pemerintah Kabupaten Ngawi harus menyiapkan SDM yang Kompeten-Mumpuni-Unggul yang tidak hanya paham administrasi SPJ untuk target WTP, tetapi juga paham regulasi, paham komunikasi dan publikasi, paham IT, paham situasi terkini dan mampu mengeksekusi (Sehingga Visi "*Semesta Berencana*" dapat terwujud.

~Terkait pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Fraksi Gabungan PAN-DEMOKRAT sangat setuju, mengingat Perda tersebut sudah tidak relevan dan bertentangan dengan perundang-undangan di atasnya serta tidak sesuai dengan kepentingan umum, seperti mengganggu investasi dan iklim usaha, menghambat pertumbuhan sektor konstruksi dan berdampak pada biaya tinggi terhadap pelaku usaha.

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Setelah menyampaikan pandangan terhadap Ranperda tentang RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029, selanjutnya Fraksi Gabungan PAN-DEMOKRAT menyampaikan apresiasi, aspirasi, saran, harapan, serta permohonan penjelasan, sebagai berikut :

1. Kami mengapresiasi kinerja Tim Penyusun yang telah menyelesaikan Ranperda RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dari tahap perencanaan hingga Paripurna;
2. Pada Visi RPJMD Tahun 2025-2029, diawali dengan *diksi* yang sama seperti periode sebelumnya, yaitu "*SEMESTA BERENCANA*", tetapi tidak diuraikan. Untuk itu, mohon penjelasan agar publik juga memahami apa makna "*Semesta Berencana*" tersebut ?
3. Visi RPJMD diantara fokusnya adalah "*terwujudnya lumbung pangan nasional*". Untuk mempertahankan status sebagai lumbung pangan nasional, mohon dijelaskan program apa saja yang akan dilaksanakan dari tahun 2025 hingga 2029, serta berapa hektar proyeksi luas panen padi dan berapa ton proyeksi peningkatan produksi tanaman padi per-tahunnya ?
4. Mohon penjelasan, apa langkah strategis pemerintah untuk dapat memproteksi lahan pertanian produktif, agar kedepan tidak tergusur menjadi lahan industri dan perumahan, mengingat investor tentunya juga membutuhkan lokasi strategis untuk investasi ?

5. Mohon penjelasan apakah Pemerintah Daerah telah memiliki peta 'Kawasan Peruntukan Industri' di Wilayah Kabupaten Ngawi ?
6. Terkait isu strategis masalah "*potensi kerawanan pangan dan desa rawan pangan*" di wilayah Kabupaten Ngawi, mohon penjelasan apakah telah dipetakan ? dan apa rencana strategis Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk mengantisipasinya ?
7. Mohon penjelasan apa langkah-langkah Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk menyiapkan SDM yang Kompeten-Mumpuni-Unggul, sehingga dapat memahami dan mampu mengeksekusi Visi RPJMD ?

Hadirin Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian Pandangan Umum, apresiasi, aspirasi, saran, harapan, serta permohonan penjelasan dari kami, selanjutnya dengan mengucapkan *Bismillahirrohmannirrohim* Fraksi Gabungan PAN-DEMOKRAT menyatakan menyetujui Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029, dan Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, untuk dibahas lebih lanjut dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sebelum kami akhiri, pada kesempatan ini, kami mengucapkan : "*Selamat Hari Jadi Kabupaten Ngawi yang ke-667*"; dengan harapan: "*Ngawi Tumbuh, Pangan Tangguh, dan semoga Ngawi tetap menjadi Lumbung Pangan Nasional Untuk Indonesia Emas*" ...*aamiin*.

Sekian, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Ngawi, 30 Juni 2025

FRAKSI GABUNGAN PAN-DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN NGAWI



[Signature]
SUPENO, S.Pd., M.M.
Ketua Fraksi



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN NGAWI**

TERHADAP

1. RANPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029
2. RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Selamat pagi, Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom Om Sadefastu

MERDEKA !!!...

Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Ngawi;

Yang kami hormati ;

- Saudara Ketua, Wakil Ketua, dan Segenap Anggota DPRD Kabupaten Ngawi;
- Saudara Sekretaris Daerah beserta Pejabat Pemerintahan Kabupaten Ngawi;
- Saudara Forum ~~Pimpinan~~ Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi;
- Saudara Camat Se-Kabupaten Ngawi;
- Para Undangan, Hadirin serta Wartawan, yang berbahagia.

Hadirin, Rapat Dewan yang Terhormat,

Mengawali penyampaian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan hari ini, perkenankanlah kami mengajak seluruh hadirin, untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di ruang Rapat Paripurna ini, semuanya dalam keadaan sehat wal'afiat... Aamiin.

Shallallahu

Pada kesempatan ini, izinkanlah Fraksi kami menyampaikan terima kasih kepada saudara pimpinan rapat, yang telah memberikan kesempatan kepada Fraksi PDI Perjuangan, guna menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi tahun 2025-2029 dan Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 18 tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi.

Demikian pula kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati Ngawi, yang telah menyampaikan Pengantar dan Penjelasan terhadap Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tersebut.

Dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah atas penyusunan RPJMD ini sebagai pedoman pembangunan daerah lima tahun ke depan serta mengucapkan terima kasih kepada Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Ngawi yang telah bekerja keras dalam pembahasan – pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ini.

Hadirin, Rapat Dewan yang terhormat,

Fraksi PDI Perjuangan memandang bahwa RPJMD ini harus menjadi acuan utama dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah, serta mampu menjawab berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Ngawi.

Dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi tahun 2025-2029, Fraksi kami menyampaikan saran, masukan, usulan sebagai berikut :

1. Sinkronisasi dan Harmonisasi:

Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi RPJMD dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ngawi, serta rencana pembangunan nasional. RPJMD juga harus selaras dengan program-program strategis nasional dan kebijakan pemerintah pusat yang relevan.

Salah satu contoh Program ketahanan pangan, Kabupaten Ngawi dikenal salah satu lumbung pangan khususnya padi, di tingkat Jawa Timur dan Nasional. Kabupaten Ngawi menduduki peringkat kedua penghasil beras terbanyak di Jawa Timur. Selain itu Kabupaten Ngawi juga pernah menjadi salah satu daerah dengan surplus gabah tertinggi di Indonesia setelah Kabupaten Karawang.

Untuk itu sangat diharapkan Investor di bidang pangan masuk di Kabupaten Ngawi yang dapat mendukung penuh Visi dan Misi Bupati, antara lain :

- a. Investor yang bisa menerima sekaligus membeli hasil panen dari para petani.
- b. Mempermudah hasil penjualan panen sehingga para petani merasa diperhatikan oleh Pemerintah Daerah dalam masa panen rayanya.

2. Prioritas Pembangunan:

Fraksi PDI Perjuangan meminta agar RPJMD ini memuat prioritas pembangunan yang jelas dan terukur, dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik daerah.

Prioritas pembangunan harus diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan ekonomi kerakyatan.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3. Penguatan Ekonomi Lokal:

RPJMD harus memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan daya saing ekonomi daerah, melalui pengembangan sektor-sektor unggulan dan penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menarik investasi, baik dari dalam maupun luar negeri.

Pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan penuh kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian daerah.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:

Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia ini penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan daya saing daerah di masa depan.

5. Pengelolaan Keuangan Daerah:

Fraksi PDI Perjuangan meminta agar pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien.

Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan pendapatan daerah, serta mengalokasikan anggaran secara tepat sasaran untuk program-program prioritas.

6. Partisipasi Masyarakat:

Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan

RPJMD. Pemerintah daerah harus membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa RPJMD ini benar-benar mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Hadirin, Rapat Dewan yang terhormat,

Terkait Ranperda tentang Pencabutan Perda Nomor 18 tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi, Fraksi PDI Perjuangan sangat apresiasi untuk memberikan kepastian hukum agar dapat meningkatkan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku jasa konstruksi dan juga dapat menarik investor agar dapat mempercepat pembangunan di Kabupaten Ngawi yang muaranya untuk kesejahteraan rakyat.

Hadirin, Rapat Dewan yang Terhormat,

Demikian masukan, saran dan usulan dari Fraksi PDI Perjuangan. Sebagai pemegang amanat untuk turut serta menjamin kelangsungan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Ngawi, maka dengan mengucap "***Bismillahirrahmanirrahim***" Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ngawi menyatakan Ranperda Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi tahun 2025-2029 dan Ranperda Kabupaten Ngawi tentang Pencabutan Perda Nomor 18 tahun 2013 tentang Ijin Usaha

Jasa Konstruksi dapat kami **TERIMA dan SETUJU** untuk dibahas pada rapat - rapat berikutnya.

Demikian Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi yang dapat kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan banyak terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,
MERDEKA !!!...**

Ngawi, 30 Juni 2025

**KETUA FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN NGAWI**



HERU KUSNINDAR

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI
PERIODE 2024 - 2029

Acara : Paripurna Penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD Dan Penjelasan 2 Ranperda
Dari Eksekutif Serta Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD.

Hari / Tanggal : Senin, 30 Juni 2025.

NO	N A M A	JABATAN	PARTAI	TANDA	TANGAN
1.	Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M (KING)	KETUA	PDIP	1. 	
2.	H. KHOIRUL ANAM MU'MIN S.H, M.H.I.	WAKIL KETUA	PKB		2. 
3.	IMAM NASRULLOH, S.E., M.Si.	WAKIL KETUA	GOLKAR	3. 	
4.	FELIGIA AGIT HENDIADI, S.H., M.H.	ANGGOTA	PDIP		4.
5.	EKO TRIYANTO, S.E., M.M.	ANGGOTA	PDIP	5. 	
6.	Hj. WIWIK HARIYANTI.	ANGGOTA	PDIP		6. 
7.	HELMI MASULIN, S.H.	ANGGOTA	PDIP	7. 	
8.	ARIEF SLAMET PRASETYO, S.Kep. (MUMUN)	ANGGOTA	PDIP		8.
9.	SUNARJATI	ANGGOTA	PDIP	9. 	
10.	S O J O	ANGGOTA	PDIP		10. 
11.	INAYA AMALYA SALMA	ANGGOTA	PDIP	11. 	
12.	H. SUDIRMAN, Sos., M.M.	ANGGOTA	PDIP		12.
13.	PUJO WAHONO	ANGGOTA	PDIP	13. 	
14.	HERU KUSNINDAR.	ANGGOTA	PDIP		14.
15.	SUJI ASTUTIK, S.Pd.	ANGGOTA	PDIP	15. 	
16.	H. ARIS SULAWAN	ANGGOTA	PDIP		16. 
17.	AGUNG REZKINA PRAMESTI, S.I.Kom.	ANGGOTA	PDIP	17. 	
18.	DIANDRA NOVY WINALDA, S.H.	ANGGOTA	PDIP		18. 
19.	TRI SUPRIH WARDOYO, S.E.	ANGGOTA	PDIP	19. 	
20.	BAMBANG SRI SALOKO, S.Si.	ANGGOTA	PDIP		20.

NO	N A M A	JABATAN	PARTAI	TANDA	TANGAN
21.	Drs. SOERADJI, M.M.	ANGGOTA	PDIP		21.
22.	ANDRI RAGILS LESTARI, S.Pd., M.H..	ANGGOTA	PDIP	22.	
23.	NURI KARIMATUNNISA, S.Si.	ANGGOTA	PKB		23.
24.	H. SUROJOGO PBSH, S.E.	ANGGOTA	PKB	24.	
25.	H. KALAM, S.H.	ANGGOTA	PKB		25.
26.	WIWIK PRIYANI	ANGGOTA	PKB	26.	
27.	H. ANAS HAMIDI, S.H.	ANGGOTA	PKB		27.
28.	S U N T O R O	ANGGOTA	GERINDRA	28.	
29.	DWI NURACHMAD RIYADI BASUKI.	ANGGOTA	GERINDRA		29.
30.	ERNING YULIASNUNIK	ANGGOTA	GERINDRA	30.	
31.	YUDHO ARI SAPUTRO	ANGGOTA	GERINDRA		31.
32.	RISKI WAHYU NUGROHO, S.Kom.	ANGGOTA	GERINDRA	32.	
33.	SARJONO, S.Pd.	ANGGOTA	GOLKAR		33.
34.	Drs. H. AMIN SUNARTO, M.Si.	ANGGOTA	GOLKAR	34.	
35.	H. WINARTO, S.H.	ANGGOTA	GOLKAR		35.
36.	SUPRIANTO	ANGGOTA	GOLKAR	36.	
37.	Hj. HANANI MUHAROMAH	ANGGOTA	PKS		37.
38.	NUR KHOLIS, S.Pd., Si.	ANGGOTA	PKS	38.	
39.	H. HARYANTO, S.IP., M.M.	ANGGOTA	PKS		39.
40.	SRI HARYANTININGSIH, S.E.	ANGGOTA	HANURA	40.	
41.	SUPENO, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	PAN		41.
42.	Dr. H. GUNADI ASH CIDIQ, S.Pd., M.Pd.	ANGGOTA	PAN	42.	
43.	H. HARIS AGUS SUSILO, S.H.	ANGGOTA	DEMOKRAT		43.
44.	AROFIK, S.M.	ANGGOTA	DEMOKRAT	44.	

DAFTAR HADIR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN NGAWI

Acara : Paripurna Penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD Dan Penjelasan 2 Ranperda Dari Eksekutif Serta Pandangan Umum Frkasi - Fraksi DPRD.





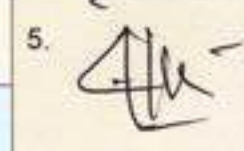

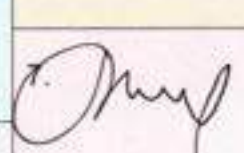





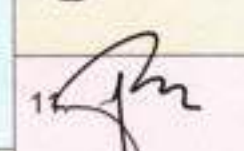


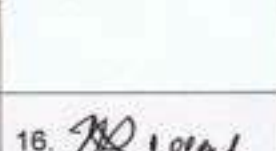
Hari / Tanggal : Senin, 30 Juni 2025

NO	N A M A	INSTANSI	TANDA	TANGAN
1.		Sekretariat Daerah		1.
2.		Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	2.	
3.		Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan		3.
4.	Bonardi	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Keuangan	4.	
5.	Suparna	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		5.
6.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.		Asisten Administrasi		
8.	A Roy H	Bagian Tata Pemerintah	8.	
9.	Fuad	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		9.
10.		Bagian Kesejahteraan Rakyat	10.	
11.		Bagian Administrasi Pembangunan		11.
12.	B. INDRATNO	Bagian Perekonomian	12.	
13.	Haris W	Bagian Organisasi		13.
14.	Euyanto	Bagian Umum	14.	
15.	Paul	Bagian Hukum		15.
16.	Mamfis	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	16.	
17.	Xulianto	Inspektorat		17.
18.	Pausik Haris	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.	
19.	Eni Mulya	Badan Keuangan		19.
20.	Indah Kusumawardana	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.	
21.	Aprilia YUDA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		21.
22.	Kusumadadi W	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.	
23.	Ike Yuliana	Sat. Pol PP		23.
24.	Indah P	RSUD Dr. Soeroto Ngawi	24.	

DAFTAR HADIR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Acara : Paripurna Penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD Dan Penjelasan 2 Ranperda
Dari Eksekutif Serta Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD.



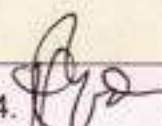

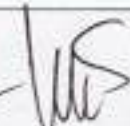
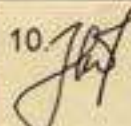
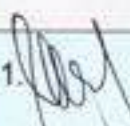
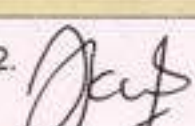


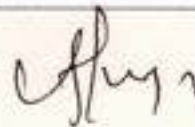


Hari / Tanggal : Senin, 30 Juni 2025

1.	BUDIHARJO	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		1. 
2.	SARITA EW	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2. 	
3.	Noor Hasan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3. 
4.	ARTIN	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	4. 	
5.	ALI MUSTAJAR	Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah		5. 
6.	MOH. SADLI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6. 	
7.	SUPARJO	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		7. 
8.	Mugrahingum	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	8. 	
9.	TotoK.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		9. 
10.	AGUS SUTRISNO	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10. 	
11.	Nanang	Dinas Kesehatan		11. 
12.	EKO ZUDON	Dinas Perikanan Dan Peternakan	12. 	
13.	Juwani Budiart	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		13. 
14.	KABUM. PU	Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Desa	14. 	
15.		Dinas Lingkungan Hidup		15.
16.	Triana WK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16. 	
17.		Dinas Sosial		17.
18.	Zaul Afi	Dinas Perhubungan	18. 	

DAFTAR HADIR KECAMATAN DI KABUPATEN NGAWI

Acara : Paripurna Penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD Dan Penjelasan 2 Ranperda Dari Eksekutif Serta Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD.

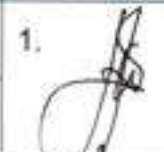
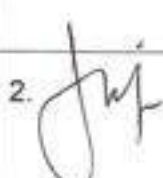
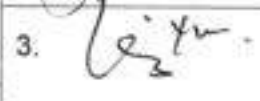
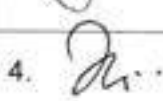
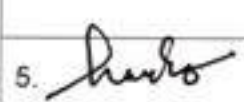

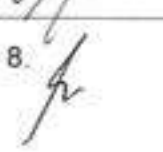

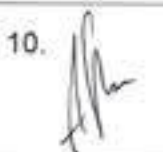

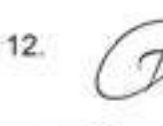
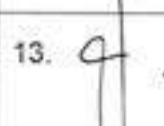
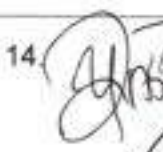

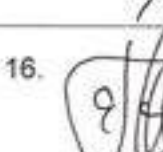

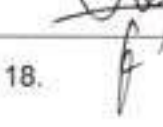
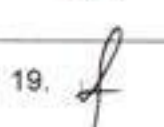
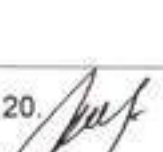
Hari / Tanggal : Senin, 30 Juni 2025



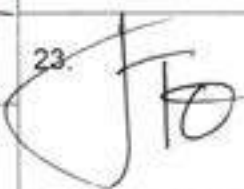


NO	N A M A	KECAMATAN	TANDA	TANGAN
1.	Eta Mahendra S	SINE	1. 	
2.		NGRAMBE		2.
3.	Mocetana	JOGOROGO	3. 	
4.	M. WAHYUDI	KENDAL		4. 
5.	Nawangah	GENENG	5. 	
6.		GERIH		6.
7.	HARI . N .	KWADUNGAN	7. 	
10.	WIDYANTI	BRINGIN		10. 
11.	HERY PUTRA	PADAS	11. 	
12.	Didik v	KASREMAN		12. 
13.	Ruswanto	NGAWI	13. 	
14.		PITU		14.
15.	AGUS	PARON	15. 	
16.	ALI PUSPA EDI	KEDUNGALAR		16. 
17.	Tulus J	WIDODAREN	17. 	
18.		KARANGANYAR		18.
19.		MANTINGAN	19. 	

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Acara : Paripurna Penjelasan Ranperda Inisiatif DPRD Dan Penjelasan 2 Ranperda
Dari Eksekutif Serta Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD.

Hari / Tanggal : Senin, 30 Juni 2025

NO	N A M A	UNDANGAN	TANDA	TANGAN
1.	Linda Kusuma	pkk kabupaten		1. 
2.	Mr. Supardi	DWP KAB NGAWI	2. 	
3.	Lilis Y. W.	PDAM		3. 
4.	IIN Agustina	PDAM	4. 	
5.	Hendro Pramono	Kantor Pertanahan		5. 
6.	Hardy And W	Bark Jatin	6. 	
7.	Danings	SAT-INTER RES. NGAWI		7. 
8.	Zeni	SAT-INTER RES. NGAWI	8. 	
9.	Padlin	TA		9. 
10.	ANGGITA S	TA	10. 	
11.	Radam	TA		11. 
12.	Pojizanto	BPRS Ngawi	12. 	
13.	Totok Narwoto	TA. F. PDIP		13. 
14.	Ydra E. D	Setda	14. 	
15.	Hilw wahpudi	TA F GAP PUN		15. 
16.	Eko JUNITO	TA FPG	16. 	
17.	Arany K	Peronda SSR		17. 
18.	Kor	Kud	18. 	
19.	Ryuz	polkos.		19. 
20.	Prka	polkos	20. 	

NO	N A M A	UNDANGAN	TANDA	TANGAN
21.	An- Harnawan	Medio		21. 
22.	MEI	MEDIA	22. 	
23.	ITO	ITV		23. 
24.	Dhoni	Jatim Times	24. 	
25.	K. P. Susanti	SMM News. co.id		25. 
26.			26.	
27.				27.
28.			28.	
29.				29.
30.			30.	
31.				31.
32.			32.	
33.				33.
34.			34.	
35.				35.
36.			36.	
37.				37.
38.			38.	
39.				39.
40.			40.	



RISALAH

RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Tanggal : 01 Juli 2025

Dalam Rangka

**TANGGAPAN BAPEMPERDA
TERHADAP PENDAPAT BUPATI TENTANG RANPERDA INISIATIF DPRD
DAN JAWABANA BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI DPRD
SERTA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP
RANPERDA INISIATIF DPRD DAN 2 (DUA) RANPERDA DARI EKSEKUTIF**



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN NGAWI

Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 9 Telp / Fax. 0351-744275 Ngawi

RISALAH RAPAT PARIPURNA

HARI,TANGGAL : Selasa, 01 Juli 2025
PUKUL : 09.45 Wib s/d selesai
TEMPAT : Aula Gedung DPRD Kabupaten Ngawi
I. JENIS RAPAT : Paripurna
II. SIFAT RAPAT : Terbuka
III. ACARA RAPAT : Tanggapan Bapemperda Terhadap Pendapat Bupati Tentang Ranperda Inisiatif DPRD Dan Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Serta Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Dan 2 (Dua) Rabperda Dari Eksekutif.

IV. PIMPINAN RAPAT :

1. Nama : Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M..
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.
2. Nama : IMAM NASRULLOH, S.E., M.Si.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi.

V. SEKRETARIS RAPAT :

1. Nama : Drs. JOKO SUMARYADI, M.H..
Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Ngawi
2. Nama : UMMU BAYYINAH, S.P., M.Si.
Jabatan : Kabag Persidangan dan Perundangan - undangan
3. Nama : ARIES SUSILO, S.H., M.M..
Jabatan : Perisalah Legislatif Ahli Muda.

VI. PESERTA SIDANG / RAPAT :

a. Anggota DPRD Kabupaten Ngawi :

• JUMLAH ANGGOTA :

1. Fraksi PDI Perjuangan : 20 Orang
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : 6 Orang
3. Fraksi Partai Gerindra : 5 Orang
4. Fraksi Partai Golkar : 5 Orang
5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA : 4 Orang

6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT
Jumlah

: 4 Orang +
: 44 Orang

• JUMLAH ANGGOTA YANG HADIR :

1. Fraksi PDI Perjuangan
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
3. Fraksi Partai Gerindra
4. Fraksi Partai Golkar
5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA
6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT
Jumlah

: 16 Orang
: 6 Orang
: 4 Orang
: 3 Orang
: 3 Orang
: 4 Orang +
: 35 Orang

YAITU :

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M. | 25. H. KALAM, S.H. |
| 2. - | 26. WIWIK PRIYANI |
| 3. IMAM NASRULLOH, S.E., M.Si. | 27. H. ANAS HAMIDI, S.H. |
| 4. FELIGIA AGIT HENDIADI, S.H., M.H. | 28. - |
| 5. - | 29. DWI NURACHMAD RIYADI BASUKI |
| 6. Hj. WIWIK HARIYANTI | 30. ERNING YULI ASNUNIK |
| 7. HELMI MASULIN, S.H. | 31. YUDHO ARI SAPUTRO |
| 8. ARIEF SLAMET PRASETYO, S.Kep. | 32. RISKI WAHYU NUGROHO, S.Kom. |
| 9. SUNARJATI | 33. - |
| 10. SOJO | 34. Drs.H. AMIN SUNARTO, M.Si. |
| 11. INAYA AMALYA SALMA | 35. - |
| 12. - | 36. SUPRIYANTO |
| 13. - | 37. Hj HANANI MUHAROMAH |
| 14. - | 38. NUR KHOLIS, s.Pd., Si. |
| 15. SUJI ASTUTIK, S.Pd. | 39. H. HARYANTO, S.IP., M.M. |
| 16. H. ARIS SULAWAN | 40. - |
| 17. AGENG REZKINA PRAMESTI, S.I.Kom. | 41. SUPENO, S.Pd. M.M. |
| 18. DIANDRA NOVY WINALDA, S.H. | 42. Dr. H. GUNADI ASH CIDIQ, S.Pd., M.PDd |
| 19. TRI SUPRIH WARDOYO, S.E. | 43. H. HARIS AGUS SUSILO, S.H. |
| 20. BAMBANG SRI SALOKO, S.Si. | 44. AROFIK, S.M. |
| 21. Drs. SOERADJI, M.M.H. | |
| 22. ANDRI RAGIL LESTARI, S.Pd. M.H. | |
| 23. NURI KARIMATUNNISA, S.Si. | |
| 24. H. SUROJOGO PBSH, S.E. | |

• JUMLAH YANG TIDAK HADIR :

1. Fraksi PDI Perjuangan
2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

: 4 Orang
: 1 Orang

3. Fraksi Partai Gerindra	: 1 Orang
4. Fraksi Partai Golkar	: 2 Orang
5. Fraksi Gabungan PKS - HANURA	: 1 Orang
6. Fraksi Gabungan PAN - DEMOKRAT	: 0 Orang +
Jumlah	: 9 Orang

YAITU :

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. H. KHOIRUL ANAN MUMIN, S.H. M.H.I | 6. SUNTORO |
| 2. EKO TRIYANTO, S.E. M.M. | 7. SARJONO, S.Pd. |
| 3. H. SUDIRMNA, S.Sos., M.M. | 8. H. WINARTO, S.H. |
| 4. PUJO WAHONO | 9. SRI HARYANTININGSIH, S.E. |
| 5. HERU KUSNINDAR | |

b. Turut Hadir / Undangan :

1. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ngawi;
2. Sdr. Sekda Kabupaten Ngawi;
3. Sdr. Staf Ahli Bupati Setda Kabupaten Ngawi.
4. Sdr. Asisten Sekda Kabupaten Ngawi;
5. Sdr. Inspektorat Kabupaten Ngawi;
6. Sdr. Kepala Dinas / Bagian / Badan / Kantor di Kabupaten Ngawi;
7. Sdr. Camat se - Kabupaten Ngawi;
8. Sdr. Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua PKK Kabupaten Ngawi.

VII. JALANNYA RAPAT :

***ASSALAAMU 'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,
SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA,
SHALOM,
OM SWAATYASTU,
NAMO BUDDHAYO, SALAM KEBAJIKAN***

Yth. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Ngawi;
Ykh. Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ngawi;
Ykh. Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi;
Ykh. Sdr. Sekda, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Inspektur, Kepala Dinas, Badan, Bagian, Kantor, dan Direktur Lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi serta Camat se - Kabupaten Ngawi;
Ykh. Sdr. Ketua Dharma Wanita Persatuan dan Ketua PKK Kabupaten Ngawi.
Rekan - rekan Wartawan serta Undangan lainnya yang kami hormati.

Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan ridlo - Nya, kita pada hari ini dapat hadir untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan terima kasih kepada saudara Bupati dan Wakil Bupati Ngawi beserta staf dan hadirin yang telah berkenan hadir memenuhi undangan kami pada Rapat Paripurna DPRD hari ini.

HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT

Sesuai dengan catatan daftar hadir yang kami terima dari Sekretariat DPRD dari 44 Orang Anggota DPRD sudah hadir 36 orang, yang belum hadir 9 orang, sehingga Rapat Paripurna DPRD hari ini telah memenuhi quorum.

Dengan mengucapkan “ *Bismillaahirrohmaanirrohiim* ” Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi pada hari Selasa, tanggal 01 Juni 2025 kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Ketok Palu 3 X

HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT

Adapun Susunan Acara Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut :

1. Tanggapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Pendapat Bupati tentang Ranperda Inisiatif DPRD.
2. Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD dan Persetujuan Bupati Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD.
3. Laporan Panitia Khusus Terhadap 2 (Dua) Ranperda Dari Eksekutif.
4. Pengambilan Keputusan
5. Penandatanganan Berita Acara dan Surat Keputusan.
6. Sambutan Bupati Ngawi
7. Penutup

Demikian Rapat Dewan yang Terhormat, jadwal dan susunan acara yang akan kita laksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini.

" Acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara. "

CATATAN PEMBAWA ACARA :

- *Tanggapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Pendapat Bupati tentang Ranperda Inisiatif DPRD oleh saudara H. Gunadi Ash Cidiq, S.Pd., M.Pd.*
- *Jawaban Bupati Ngawi Terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD dan Persetujuan Bupati terhadap Ranperda Inisiatif DPRD disampaikan oleh saudara Onny Anwar Harsono, S.T., M.H.*

PIMPINAN RAPAT :

HADIRIN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT

Demikian tadi telah kita ikuti bersama tanggapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah terhadap Pendapat Bupati Ngawi tentang Ranperda Inisiatif DPRD dan Penyampaian Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi dan Persetujuan Bupati Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD, untuk itu kepada Bupati dan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Dearah kami sampaikan terima kasih.

Acara selanjutnya adalah laporan Panitia Khusus terhadap 2 (Dua) Ranperda dari Eksekutif, Oleh karena itu kami ingin menanyakan kesiapan dari Panitia Khusus.

Apakah Panitia Khusus RANPERDA sudah siap ?????

Terima kasih, Panitia Khusus DPRD telah menyatakan kesiapan untuk menyampaikan laporan tentang hasil pembahasan Ranperda Kabupaten Ngawi.

"Untuk itu acara selanjutnya akan dipandu oleh pembawa acara "

CATATAN PEMBAWA ACARA :

- Laporan panitia Khusus Ranperda disampaikan oleh saudara Yudho Ari Saputro.

PIMPINAN RAPAT :

HADIRIN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT

Demikian tadi telah kita ikuti bersama penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ngawi yang kesimpulannya dapat menerima dan menyetujui 2 Ranperda dari Eksekutif, untuk ditetapkan menjadi Peraturan

Daerah Kabupaten Ngawi dengan disertai beberapa usul, saran, himbauan dan pertanyaan, untuk itu kepada Juru Bicara Panitia Khusus kami sampaikan terima kasih.

Dengan telah disampaikannya Laporan Panitia Khusus dan Pendapat Bupati, maka sekali lagi kami tawarkan materi rapat ini kepada Rapat Dewan yang terhormat...

Apakah 2 (Dua) Ranperda usulan Eksekutif dan Rancangan Perda Inisiatif Kabupaten Ngawi dapat diterima dan disetujui ?

Rapat Dewan **Setujuuuuuuuuuuu** !!!!!!!

Terima kasih, sah menjadi Keputusan Dewan

Ketok Palu 1x

CATATAN PEMBAWA ACARA :

- Penandatanganan Berita Acara Persetujuan bersama Antara Bupati Ngawi dengan DPRD, dilanjutkan Penandatanganan Keputusan DPRD Persetujuan Penetapan Ranperda Inisiatif dan 2 (Dua) Ranperda dari Eksekutif.
- Sambutan Bupati Ngawi
- Penutup.

PENUTUP :

HADIRIN DAN RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT

Demikian tadi telah kita ikuti bersama sambutan Bupati Ngawi, untuk itu kami ucapkan terima kasih atas penyampaian sambutannya. Dengan telah disetujui dan ditetapkannya 2 (Dua) Ranperda dari Eksekutif dan Ranperda Inisiatif DPRD menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025, maka selesailah rangkaian acara Rapat Paripurna DPRD hari

ini. Harapan kami Peraturan Daerah tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya.

Kami atas nama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ngawi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas kerja samanya selama ini, sehingga semua acara dapat berlangsung dengan baik dan lancar, disamping itu kami juga menyampaikan terima kasih pula kepada hadirin yang telah mengikuti jalannya Rapat paripurna DPRD hingga selesai.

Marilah kita akhiri Rapat paripurna siang ini bersama - sama dengan mengucapkan Hamdallah "***Alhamdulillah Rabbil'aalamin.***"

Dengan ini Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi pada hari Selasa, tanggal 01 Juli 2025 kami nyatakan ditutup.

Ketok Palu 3x

TERIMA KASIH,

WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB.

KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI



Dr. Y. WONO KARTIKO, S.E., M.M.

SEKRETARIS DPRD KAB. NGAWI



Drs. JOKO SUMARYADI, M.H.
Pembina Utama Muda
Nip. 19670927 199303 1 008



**BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI**

**TANGGAPAN BAPEMPERDA
TERHADAP PENDAPAT BUPATI NGAWI
ATAS RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN NGAWI
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI**

"Assalaamu' alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

"Salam Sejahtera bagi kita semua"

Yang terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Ngawi

Yang kami hormati Pimpinan DPRD Kabupaten Ngawi

Yang kami hormati Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Ngawi atau yang mewakili.

Yang kami hormati Sdr. Sekda, Sdr. Staf Ahli Bupati, Sdr. Asisten Sekda
serta seluruh Pimpinan Perangkat Daerah Pemerintah
Kabupaten Ngawi.

Yang kami hormati segenap Anggota Dewan, rekan-rekan Wartawan serta
hadirin Undangan yang berbahagia.

Pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran
Allah SWT, karena atas Rahmat dan Ridlo-Nya semata kita pada hari ini,
kita masih dapat hadir kembali untuk melanjutkan Rapat Paripurna DPRD
Kabupaten Ngawi dalam keadaan sehat wal afiat.

Sebelum kami menyampaikan Tanggapan Bapemperda terhadap
Pendapat Bupati atas Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi, terlebih
dahulu kami menyampaikan ucapan terimakasih kepada Pimpinan Rapat
atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Ucapan terima kasih juga
kami sampaikan kepada Sdr. Bupati beserta Staf jajarannya, stake-holder
dan pihak-pihak lain yang telah ikut membahas Rancangan Peraturan
Daerah inisiatif DPRD tersebut, baik pada saat Rapat Kerja, acara Public
Hearing dan pada saat rapat Fasilitasi Ranperda di Biro Hukum Provinsi,
atas kajian, masukan, saran, pertimbangan demi menjadikan suatu
Peraturan Daerah yang berkualitas.

Hadirin, Sidang Dewan yang terhormat,

Sebagaimana telah kami sampaikan pada Pengantar / penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, yang mana diharapkan dengan adanya Rancangan Perda tersebut nantinya dapat meningkatkan perekonomian sehingga membawa kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Ngawi.

Selanjutnya kami mengapresiasi baik atas pendapat Bupati terhadap Rancangan Perda Inisiatif DPRD tersebut. Dalam kesempatan ini pula kami sampaikan terima kasih kepada Sdr Bupati atas kerjasamanya yang baik selama ini. Semoga keberhasilan dan kemajuan Kabupaten Ngawi dapat terus tercapai dan dapat dinikmati oleh segenap masyarakat Kabupaten Ngawi. Aamiin.

Sebelum kami akhiri, perlu diketahui bahwa pada tahun 2023 yang lalu, DPRD Kabupaten Ngawi juga mengajukan 5 (lima) Ranperda Inisiatif, yaitu ;

1. Ranperda tentang Pendidikan Karakter
2. Ranperda tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan
3. Ranperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi
4. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum
5. Ranperda tentang Penyelenggaraan Pertanian Ramah Lingkungan Berkelanjutan.

Harapannya 4 (empat) Ranperda lainnya segera mendapatkan hasil fasilitasi Gubernur sehingga dapat segera disahkan dalam Rapat Paripurna DPRD mendatang.

Selanjutnya pada tanggal 7 Juli 2025 yang akan datang, kita masyarakat Kabupaten Ngawi akan memperingati Hari Jadi Ngawi yang ke 667 dengan tema "Ngawi Lumbung Pangan Nasional untuk Indonesia Emas". Untuk itu kami mengucapkan DIRGAHAYU Kabupaten Ngawi. Semoga Kabupaten Ngawi tambah maju dan sejahtera. Aamiin.

Hadirin, Sidang Dewan yang terhormat,

Demikian yang dapat kami sampaikan, sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah meluangkan waktu menghadiri Rapat Paripurna ini sampai selesai nanti.

Mohon maaf bilamana ada kesalahan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Ngawi, 1 Juli 2025

Bapemperda DPRD Kab Ngawi

Ketua,



Dr. H. GUNADI ASH CIDIQ, S.Pd. M.Pd.



**JAWABAN
BUPATI NGAWI**

ATAS

PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI DPRD

TANGGAL 30 JUNI 2025

DALAM RANGKA MEMBAHAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029, RANPERDA

TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG

IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN 1 RANPERDA INISIATIF DPRD

TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLOOHI WABAROKATUH

**YTH. SDR. KETUA, WAKIL KETUA DAN SEGENAP ANGGOTA DPRD
KABUPATEN NGAWI;**

YTH. SDR. ANGGOTA FORKOPIMDA;

YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH;

**YTH. SDR. ASISTEN, STAF AHLI, KEPALA PERANGKAT DAERAH,
KABAG DAN CAMAT SE – KABUPATEN NGAWI; SERTA**

**YTH. REKAN MEDIA, LSM DAN TAMU UNDANGAN HADIRIN
SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.**

**RASA SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT SELALU KITA
PANJATKAN KARENA ATAS BERKAT LIMPAHAN RAHMAT DAN
KARUNIA-NYA PADA KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI KITA
DIBERIKAN KESEMPATAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA**



DPRD KABUPATEN NGAWI, DENGAN AGENDA JAWABAN BUPATI TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SELALU KITA LIMPAH CURAHKAN KEPADA JUNJUNGAN KITA NABI BESAR MUHAMMAD SHALLALLAHU'ALAIHI WASALLAM, BESERTA KELUARGA DAN PARA SAHABATNYA, SEMOGA KITA TERMASUK ORANG-ORANG YANG MENDAPATKAN SYAFA'ATNYA KELAK DI YAUMUL QIYAMAH. AAMIIN YA RABBAL AALAMIIN.....

SAUDARA PIMPINAN, ANGGOTA DEWAN DAN PESERTA RAPAT DEWAN YANG TERHORMAT,

SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ATAS PERHATIAN DAN UPAYANYA, DALAM MEMBAHAS RANPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029, RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAN 1 RANPERDA INISIATIF DPRD TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI, SEHINGGA DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK DAN LANCAR, KHUSUSNYA KEPADA JURU BICARA MASING-MASING FRAKSI YANG PADA HARI SENIN, TANGGAL 30 JUNI 2025 TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUM TERHADAP NOTA PENGANTAR RANPERDA, YAITU :

1. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2. FRAKSI PARTAI GERINDRA
3. FRAKSI PARTAI GOLKAR
4. FRAKSI GABUNGAN (PKS - HANURA)
5. FRAKSI GABUNGAN (PAN - DEMOKRAT)
6. FRAKSI PDI PERJUANGAN



SELANJUTNYA, BERKAITAN DENGAN PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI, PERKENANKANLAH SAYA MENYAMPAIKAN TANGGAPAN ATAS PERTANYAAN, SARAN, SERTA HIMBAUAN YANG TELAH DISAMPAIKAN OLEH SEGENAP FRAKSI DENGAN JAWABAN SEBAGAI BERIKUT:

I. TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

1. **FRAKSI PKB MEMANDANG PERLU DAN MENGAPRESIASI PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI YANG TELAH MENGAJUKAN RANPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029, DAN TIDAK LAIN MERUPAKAN UPAYA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN NGAWI MENJADI LEBIH BAIK LAGI DALAM SEGALA ASPEK PEMBANGUNAN, DAPAT MENYELARASKAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAN SELANJUTNYA KEPUTUSAN PROGRAM RENCANA JANGKA MENENGAH DAERAH INI BISA TERSUSUN DENGAN BAIK DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.**

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS APRESIASINYA, RPJMD SEBAGAI PENJABARAN VISI MISI BUPATI DAN WAKIL BUPATI NGAWI YAITU SEMESTA BERENCANA "TERWUJUDNYA LUMBUNG PANGAN NASIONAL YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN, MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI SEJAHTERA, BERAKHLAK, DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG" TENTUNYA SELURUH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KE DEPAN MENGARAH PADA PEMBANGUNAN KABUPATEN NGAWI DI SEGALA BIDANG DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.



2. RPJMD MENJADI SALAH SATU RANPERDA KRUSIAL BAGI PEMBANGUNAN, LANTARAN MENJADI SEMACAM GRAND DESIGN, MEMUAT RANCANGAN KERJA KABUPATEN NGAWI SELAMA 5 TAHUN KE DEPAN YANG WAJIB MEMENUHI ASPEK HINGGA SESUAI KEBUTUHAN MASYARAKAT, MAU SEPERTI APA NANTINYA, HARUS DIBAHAS SECARA MATANG. FRAKSI PKB DPRD NGAWI MEMASTIKAN BAKAL MENGAWAL KETAT PENYUSUNAN ATURAN INI, TERMASUK DALAM PENERAPANNYA MENDATANG.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA, KAMI JUGA BERHARAP UNSUR LEGISLATIF JUGA TURUT MENGAWAL TERCAPAINYA TARGET-TARGET PEMBANGUNAN PADA RPJMD 5 TAHUN KE DEPAN SESUAI DENGAN AMANAT PERMENDAGRI NOMOR 86 TAHUN 2017, DIMANA PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DISUSUN SALAH SATUNYA MELALUI PENDEKATAN POLITIS DAN PARTISIPATIF.

3. RPJMD BUKANLAH SEKEDAR DOKUMEN FORMAL TETAPI MERUPAKAN MANIFESTASI DARI JANJI POLITIK SAUDARA BUPATI YANG HARUS SELARAS DENGAN RPJMD PROVINSI DAN RPJMN, YANG KEMUDIAN DIJABARKAN KEDALAM PROGRAM-PROGRAM YANG TERUKUR DAN BERORIENTASI PADA HASIL YANG NYATA. RPJMD INI MENJADI KOMPAS BAGI SELURUH PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MEWUJUDKAN KABUPATEN NGAWI SEBAGAI KABUPATEN YANG MEMBANGUN KOTANYA DAN MEMBANGUN DESANYA SEHINGGA ANTARA KOTA DAN DESA BISA MAJU SECARA BERIMBANG BERKEADILAN SERTA BISA



MENSEJAHTERAKAN SELURUH MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA, RPJMD KABUPATEN NGAWI JUGA TELAH MELALUI PROSES PENYELARASAN DENGAN RPJMD PROVINSI JAWA TIMUR YANG MERUPAKAN PENJABARAN VISI MISI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR DAN RPJMN YANG MERUPAKAN PENJABARAN ASTA CITA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN RI, YANG MANA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG MERATA ANTARA KOTA DAN DESA TELAH TERJABARKAN PADA MISI KEDUA DENGAN SASARAN PEMBANGUNAN "MENINGKATNYA KEMANDIRIAN DESA" DIUKUR DENGAN INDIKATOR KINERJA INDEKS DESA.

4. **DATA BPS TERBARU MENUNJUKKAN BAHWA KABUPATEN NGAWI MASIH TERCATAT SEBAGAI DAERAH DENGAN TINGKAT KEMISKINAN TERTINGGI KE ENAM DI JAWA TIMUR DENGAN PROSENTASE 13,86% . ANGKA INI MENUNJUKKAN BAHWA MASIH BANYAK MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI YANG HIDUP DIBAWAH GARIS KEMISKINAN. MESKIPUN ADA PENURUNAN DIBANDINGKAN TAHUN SEBELUMNYA. UNTUK ITU BAGAIMANAKAH PROGRAM PROGRAM STRATEGIS YANG NYATA UNTUK MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN TERSEBUT.**



JAWABAN :

PROGRAM PROGRAM STRATEGIS YANG DILAKUKAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI UNTUK MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN DIANTARANYA :

1. KETEPATAN SASARAN BANTUAN MULAI DARI VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
 2. PENINGKATAN KEMANFAATAN KARTU SEMESTA BERKEADILAN UNTUK BEASISWA PENDIDIKAN MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI
 3. PENDIDIKAN KESETARAAN DAN INSKLUSI
 4. PENINGKATAN FASILITAS DAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER KESEHATAN
 5. ZERO STUNTING
 6. BANTUAN PERMAKINAN BAGI MASYARAKAT NON PRODUKTIF
 7. PENINGKATAN KEMUDAHAN AKSES PERMODALAN BAGI PETANI DAN PELAKU USAHA MIKRO
 8. REHABILITASI MENUJU RUMAH TINGGAL LAYAK HUNI (RTLH)
 9. PENINGKATAN KUALITAS DAN VOLUME JALAN DAN JEMBATAN
 10. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN
 11. PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN YANG SEHAT
- DAN LAIN-LAINNYA YANG KAMI TUANGKAN DALAM PROGRAM UNGGULAN DAERAH.
5. TERHADAP KEBIJAKAN BELANJA DAERAH KABUPATEN NGAWI, DIARAHKAN UNTUK DAPAT MENDUKUNG PENCAPAIAN RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029, SESUAI DENGAN VISI PEMBANGUNAN YANG TELAH DITETAPKAN YAITU : "KABUPATEN NGAWI SEBAGAI



LUMBUNG PANGAN NASIONAL YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERKELANJUTAN", BELANJA DAERAH DAPAT DIGUNAKAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCAPAIAN VISI TERSEBUT. PENGELOLAAN BELANJA SEJAK PROSES PERENCANAAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN, PELAPORAN HINGGA PERTANGGUNGJAWABAN HARUS MEMPERHATIKAN ASPEK EFEKTIFITAS, EFISIENSI DAN TRANSPARAN SERTA AKUNTABEL

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS MASUKANNYA, KEBIJAKAN BELANJA DAERAH TELAH DAN AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN VISI RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 – 2029. PENGGUNAAN SISTEM DIGITAL SEPERTI SIPD, LPSE DAN SISTEM DIGITAL LAINNYA, AKAN MENDORONG PENGGUNAAN BELANJA DAERAH YANG EFEKTIF, EFISIEN, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

SELAIN ITU, PENGELOLAAN BELANJA MULAI PROSES PERENCANAAN AKAN MEMPERHATIKAN EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI GUNA MEWUJUDKAN PROSES PERENCANAAN PENGANGGARAN SAMPAI TAHAP HASIL PELAPORAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH MENJADI TARGET UTAMA DAN BELANJA UNTUK URUSAN WAJIB MENGIKAT SERTA URUSAN PILIHAN YANG MENDUKUNG PROGRAM UNGGULAN AKAN DIPRIORITASKAN.

6. TERHADAP PERENCANAAN KESEHATAN SOSIAL MASYARAKAT, TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR (TPA) DI TIAP KECAMATAN KURANG LAYAK DAN KURANG REPRESENTATIF, KHUSUSNYA TPA DI KECAMATAN NGRAMBE, JOGOROGO, KENDAL. JIKA MUSIM KEMARAU



TIBA SAMPAH BERHAMBURAN DI JALAN DAN JIKA MUSIM HUJAN TIBA, BAU MENYENGAT KEMANA-MANA. MOHON PEMERINTAH DAERAH MERENCANAKAN JANGKA MENENGAH SECARA MATANG UNTUK MEMBUAT TPA YANG LAYAK DAN REPRESENTATIF DI TIAP KECAMATAN.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA, UNTUK MASALAH SAMPAH KHUSUSNYA DI DAERAH KECAMATAN NGRAMBE, JOGOROGO, KENDAL PEMERINTAH DAERAH SUDAH MERENCANAKAN UNTUK MEMBUAT TPA DI KECAMATAN JOGOROGO YANG AKAN MENAMPUNG SAMPAH DARI WILAYAH KECAMATAN JOGOROGO, NGRAMBE, KENDAL DI TAHUN 2027. SEDANGKAN UNTUK WILAYAH KECAMATAN YANG BELUM ADA TPA AKAN DIADAKAN SECARA BERTAHAP SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

MENGINGAT KETERBATASAN LAHAN UNTUK TPA, DIPERLUKAN PARTISIPASI DAN PERAN SERTA MASYARAKAT UNTUK BISA MENGELOLA SAMPAH DARI RUMAH MELALUI 3R (*REDUCE, REUSE DAN RECYCLE*) SEHINGGA YANG MASUK KE TPA ADALAH HANYA SAMPAH RESIDU YAITU SAMPAH YANG SUDAH TIDAK BISA DIDAUUR ULANG DAN SUDAH TIDAK MEMILIKI NILAI EKONOMI.

7. **DALAM PENYUSUNAN RPJMD, MOHON PEMERINTAH DAERAH MERENCANAKAN DAN MENGINVENTARISIR PESANTREN UNTUK DIJADIKAN MITRA DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN AGAMA YANG HUMANIS DAN BISA BERSIFAT TOLERANSI.**



JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA, PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TURUT MENJADIKAN PESANTREN SEBAGAI MITRA DALAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA YANG HUMANIS DAN BERSIFAT TOLERANSI DIBAWAH KOORDINASI KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN NGAWI. DIHARAPKAN DENGAN KERJA SAMA YANG BAIK ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DAN KEMENAG NGAWI MAKA AKAN TERWUJUD GENERASI ANAK YANG UNGGUL DALAM PENDIDIKAN AKADEMIS MAUPUN PENDIDIKAN AGAMA.

8. **FRAKSI PKB BERHARAP RPJMD DAPAT MENJADI SOLUSI UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH PENGANGGURAN, KEMISKINAN, KONFLIK SOSIAL SERTA PENGENTASAN KEMISKINAN.**

JAWABAN :

TERIMA KASIH SARAN DAN MASUKANNYA, DALAM PENYUSUNAN RPJMD SUDAH TERINTEGRASI DENGAN DOKUMEN LAINNYA, DIANTARANYA DOKUMEN RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH, DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) DAN DOKUMEN RENCANA INDUK KETENAGAKERJAAN YANG DIJADIKAN PEDOMAN UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH PENGANGGURAN, KEMISKINAN, KONFLIK SOSIAL SERTA PENGENTASAN KEMISKINAN.

9. **FPKB MENYARANKAN AGAR PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI MEMBERIKAN PERHATIAN HUSUS TERHADAP :**
- a) **SEKTOR PERTANIAN DARI MULAI SAPRODI (SARANA PRODUKSI) DENGAN MEMASTIKAN ADANYA PUPUK SUBSIDI BISA DIPEROLEH DENGAN MUDAH PASCA PANEN, MENJAMIN HARGA YANG STABIL YANG**



MENGUNTUNGKAN PETANI BAIK DI MUSIM HUJAN MAUPUN DI MUSIM KEMARAU.

JAWABAN :

PUPUK BERSUBSIDI DAPAT DIPEROLEH MELALUI APLIKASI I-PUBERS DENGAN MEMBAWA FOTOCOPY KTP PENERIMA PUPUK BERSUBSIDI SESUAI YANG TERCANTUM DALAM ERDKK. DENGAN ADANYA HPP GABAH PEMERINTAH Rp. 6.500,-/kg KETERJAMINAN HARGA DI TINGKAT PETANI SUDAH MEMBAIK, BAHKAN SAAT INI DI LAPANGAN HARGA GABAH GKP COMBINE SUDAH MENCAPAI Rp. 7.000 - 7.300,-/kg. ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025 YAITU :

- UREA 38.510 TON,
- NPK 26.129 TON,
- ORGANIK 14.763 TON

SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI MELALUI PERANGKAT DAERAH TERKAIT DALAM MEMASTIKAN TERSEDIAANYA PUPUK BERSUBSIDI AGAR BISA DIPEROLEH DENGAN MUDAH PASCA PANEN SERTA MENJAMIN KESTABILAN HARGA PUPUK BERSUBSIDI, YAITU DENGAN MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI PADA DISTRIBUTOR DAN KIOS PUPUK BERSUBSIDI UNTUK MEMASTIKAN KETERSEDIAAN PUPUK, MENCEGAH KELANGKAAN, DAN MENJAGA STABILITAS HARGA PUPUK.

- b) **SEKTOR PENDIDIKAN PROGRAM PENDIDIKAN WAJIB 9 TAHUN, HARUS BISA TERLAKSANA SECARA MUDAH DAN TIDAK MEMBEBANI MASYARAKAT.**



JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA, UPAYA YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI YAITU MELALUI :

- PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN YANG MEMADAI,
- BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI KELUARGA KURANG MAMPU,
- PENGUATAN PERAN SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA DALAM PERLUASAN AKSES,
- DAN KERJA SAMA LINTAS SEKTOR UNTUK MENGATASI HAMBATAN GEOGRAFIS MAUPUN SOSIAL.

DENGAN DEMIKIAN, PROGRAM PENDIDIKAN WAJIB 9 TAHUN BENAR-BENAR MENJADI JEMBATAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA DI DAERAH.

- c) SEKTOR KESEHATAN, PELAYANAN TERHADAP PASIEN HARUS TERUS MENERUS DITINGKATKAN SECARA PROFESIONAL BAIK KERAMAHAN MAUPUN PELAYANAN TERHADAP PASIEN, TIDAK MEMBEDAKAN PELAYANAN TERSEBUT KEPADA PASIEN YANG MENGGUNAKAN BPJS DAN YANG NON BPJS.

JAWABAN :

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BERKOMITMEN TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN KEPADA MASYARAKAT DENGAN TERUS MENINGKATKAN KOMPETENSI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN, PEMENUHAN SARANA PRASANA ALAT KESEHATAN, TERMASUK



DIDALAMNYA PELAYANAN KESEHATAN YANG BERORIENTASI PADA PASIEN, YANG MENUNTUT TIDAK HANYA KERAMAHAN PETUGAS TETAPI JUGA PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN DI SEMUA LINI POS PELAYANAN.

SAAT INI KABUPATEN NGAWI SUDAH *UNIVERSAL HEALTH COVERAGE* (UHC) ARTINYA 98 PERSEN MASYARAKAT NGAWI SUDAH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN DARI BPJS KESEHATAN, SEHINGGA DIKSI PELAYANAN MEMBEDAKAN BPJS DAN NON BPJS SUDAH TIDAK RELEVAN LAGI KARENA HAMPIR SEMUA PASIEN YANG DILAYANI ADALAH PASIEN YANG MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN DARI BPJS.

d) PEMBANGUNAN PASAR SEMBUNG.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PASAR ADALAH SALAH SATU PRIORITAS YANG SANGAT DIHARAPKAN OLEH MASYARAKAT DAN MEMILIKI DAMPAK SIGNIFIKAN TERHADAP PERGERAKAN EKONOMI LOKAL.

UNTUK TITIK PEMBANGUNAN PASAR AKAN KAMI KERUCUTKAN DALAM RANCANGAN AKHIR RPJMD DAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA YANG DISUSUN OLEH PERANGKAT DAERAH TEKNIS DALAM HAL INI DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA.



- e) **MOHON DINAS TERKAIT MENGAWASI HARGA GABAH WAKTU PANEN RAYA.**

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA, SAAT INI SUDAH ADA PETUGAS ENUMERATOR DAN PIP SERTA PETUGAS DATA DARI PENYULUH DI SETIAP KECAMATAN YANG MEMONITOR HARGA GABAH.

- f) **PEMASANGAN PENERANGAN JALAN UMUM DI JEMBATAN GEMPOL.**

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA, UNTUK ALAT PENERANGAN JALAN (APJ) PEMERINTAH DAERAH SUDAH BERKOMITMEN SECARA BERTAHAP AKAN MEMBANGUN APJ BARU SETIAP TAHUN. UNTUK TAHUN 2025 SUDAH AKAN DIBANGUN 300 TITIK APJ BARU DENGAN LOKASI DI SEBAR DI SEMUA KECAMATAN, SEDANGKAN UNTUK TAHUN 2026-2029 AKAN DIBANGUN APJ BARU DENGAN TARGET 1.000 (SERIBU) TITIK SETIAP TAHUNNYA.

- g) **MOHON PERATURAN DAERAH TURUNAN DARI UNDANG-UNDANG PESANTREN DAPAT SEGERA DITINDAKLANJUTI UNTUK KESEJAHTERAAN SANTRI DAN ANAK-ANAK YATIM PIATU PANTI ASUHAN/LKSA.**

JAWABAN :

SAAT INI TELAH DILAKUKAN KOORDINASI DENGAN BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SELAKU KOORDINATOR PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN. SELANJUTNYA DAPAT DI SAMPAIKAN BAHWA RANCANGAN



PERATURAN BUPATI ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN SEDANG DALAM PROSES DAN AKAN DI TINDAK LANJUTI.

- h) MOHON SAUDARA BUPATI DAN INSTANSI TERKATI BISA MENINDAKLANJUTI DAN MEREVISI PERATURAN BUPATI TERKAIT HONOR KADER YANG DITETAPKAN SENILAI 100 RIBU DIRASA KURANG. DISINI TIDAK SESUAI DENGAN TUGAS KADER YANG SEMAKIN LAMA SEMAKIN BERTAMBAH TUGASNYA. DIDALAM PELAKSANAAN POSYANDU DIMANA KADER MASIH DIBEANI BIAYA PEMBUATAN PMT BALITA, PMT LANSIA BERSAMAAN DENGAN KEGITAN POS ILP KADER JUGA MASIH TERBEBANI BANYAK PELAPORAN, KADER JUGA MASIH HARUS MENGELUARKAN BIAYA DULU BARU PER BERAPA BULAN BARU MENDAPATKAN UANG GANTI PMT. MOHON DITINDAKLANJUTI

JAWABAN :

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI AKAN SENANTIASA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KADER DENGAN TETAP MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

SAAT INI KADER MASIH HARUS MENGELUARKAN BIAYA PEMBUATAN PMT BARU BEBERAPA BULAN MENDAPATKAN UANG GANTI PMT DIKARENAKAN MENGIKUTI ALUR PEMENUHAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DI DESA. KAMI AKAN BERUSAHA AGAR KADER MENDAPATKAN



UANG PANJAR SEHINGGA KADER TIDAK PERLU MENALANGI UNTUK BIAYA PEMBUATAN PMT.

INSENTIF KADER POSYANDU DI KABUPATEN NGAWI DITETAPKAN SEBESAR Rp. 100.000 PER BULAN PENDANAAN BERSUMBER DARI APBD UNTUK 5 ORANG KADER, APABILA KADER POSYANDU DIDESA TERSEBUT LEBIH DARI 5 SISANYA DIANGGARKAN DARI APB DESA.

KADER POSYANDU DESA BERBEDA DENGAN KADER POS ILP DIMANA UNTUK KADER ILP MENDAPATKAN HONOR YANG BERSUMBER DARI APBD SEBESAR Rp.300.000 PER BULAN.

KABUPATEN NGAWI MERUPAKAN SATU-SATUNYA KABUPATEN YANG SECARA TEGAS MENETAPKAN BESARAN INSENTIF BAGI KADER POSYANDU PADA PERBUP PENYUSUNAN APBDES.

II. TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA

- 1. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR HARUS LEBIH MERATA DI SELURUH WILAYAH KABUPATEN NGAWI, DENGAN FOKUS PADA DAERAH YANG SELAMA INI KURANG MENDAPAT PERHATIAN.**

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA, PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DENGAN MEMPRIORITASKAN DAERAH YANG MEMANG MENJADI PRIORITAS DAN MEMPERTIMBANGAKAN ASAS PEMERATAAN.



2. **PENGADAAN LAMPU JALAN DARI DESA SELOPURO SAMPAI DESA KALANG, KARENA RAWAN KECELAKAAN DAN BEGAL.**

JAWABAN :

JAWABAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA PENJELASAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ROMAWI I NOMOR 9 HURUF f.

3. **PENGADAAN LAMPU JALAN SOCO TANJUNG SARI, KARENA RAWAN KECELAKAAN.**

JAWABAN :

JAWABAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA PENJELASAN FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA ROMAWI I NOMOR 9 HURUF f.

4. **PERBAIKAN SDN GIRIMULYO 2 KECAMATAN JOGOROGO.**

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS MASUKANNYA, PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TELAH MENGALOKASIKAN ANGGARAN REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN SEKOLAH YANG BERSUMBER DARI HASIL EFISIENSI SEBESAR 4 MILIAR RUPIAH DALAM ANGGARAN APBD TAHUN 2025 PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, YANG NANTINYA BISA DIGUNAKAN UNTUK REHAP TERMASUK SALAH SATUNYA SDN GIRIMULYO 2 JOGOROGO.

III. TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR

1. **DALAM RANGKA MEMASTIKAN TARGET MASING-MASING INDIKATOR KINERJA DAERAH YANG DITETAPKAN, MOHON DIPERHATIKAN KEMAMPUAN PENDANAAN**



**PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029.**

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA. TARGET YANG DITETAPKAN PADA RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029 BERSIFAT OPTIMIS NAMUN REALISTIS MEMPERTIMBANGKAN RASIONALITAS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DAN TERDUKUNG OLEH PROGRAM PERANGKAT DAERAH. DI SISI LAIN SALAH SATU SASARAN PEMBANGUNAN PADA RPJMD ADALAH MENINGKATNYA KEMANDIRIAN FISKAL KABUPATEN NGAWI SEHINGGA KAMI JUGA MENARGETKAN ADANYA KENAIKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SIGNIFIKAN SECARA BERTAHAP UNTUK 5 TAHUN KE DEPAN DAN Mencari SUMBER-SUMBER PENDAPATAN LAIN YANG SAH.

2. **BERDASAR GAMBARAN KONDISI GEOGRAFIS LETAK WILAYAH, PERLU PEMERATAAN PEMBANGUNAN WILAYAH, AGAR TIDAK TERLALU TIMPANG ANTARA WILAYAH SATU DENGAN WILAYAH LAINNYA, TERUTAMA ANTARA UTARA BENGAWAN SOLO DENGAN SELATAN BENGAWAN SOLO, SEHINGGA MANFAAT DAPAT DIRASAKAN OLEH MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI SECARA MERATA.**

JAWABAN :

KAMI SANGAT MENYADARI KONDISI GEOGRAFIS NGAWI YANG TERBAGI OLEH BENGAWAN SOLO, YANG SECARA HISTORIS DAPAT MENCIPTAKAN KETIMPANGAN DALAM AKSESIBILITAS DAN PEMBANGUNAN.

OLEH KARENA ITU, DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) INI, PRINSIP PEMERATAAN PEMBANGUNAN MENJADI SALAH SATU



PRIORITAS UTAMA DAN DIINTEGRASIKAN DALAM SETIAP KEBIJAKAN DAN PROGRAM.

BERIKUT ADALAH LANGKAH-LANGKAH KONKRET YANG AKAN KAMI AMBIL UNTUK MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN:

- PERENCANAAN TATA RUANG YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN
- PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS
- PEMBERDAYAAN EKONOMI WILAYAH DAN OPTIMALISASI POTENSI LOKAL
- PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN DASAR

KAMI BERKOMITMEN UNTUK MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN MERATA, AGAR SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI, BAIK YANG BERADA DI UTARA MAUPUN SELATAN BENGAWAN SOLO, DAPAT MERASAKAN MANFAAT PEMBANGUNAN SECARA ADIL DAN BERSAMA-SAMA MERAH KESEJAHTERAAN.

3. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA MOHON UNTUK TETAP DIPERHATIKAN, SERTA JUGA PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN, SENI BUDAYA DAN PARIWISATA DAERAH DAN DESA.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN MASUKANNYA. KAMI SEPENUHNYA SEPAKAT BAHWA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA HARUS TETAP MENJADI PERHATIAN UTAMA, DAN KAMI JUGA AKAN MEMBERIKAN PERHATIAN SERIUS PADA PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN,



SENI BUDAYA, DAN PARIWISATA, BAIK DI TINGKAT DAERAH MAUPUN DESA.

4. SEIRING DENGAN PROGRAM WILAYAH INDUSTRI DI KABUPATEN NGAWI YANG SEDANG BERKEMBANG PESAT, MAKA MOHON DIPERHATIKAN UNTUK KESEIMBANGAN DENGAN KEBERADAAN LAHAN SAWAH PRODUKTIF YANG SEKARANG HASIL PERTANIAN KABUPATEN NGAWI JUGA MENINGKAT, BAHKAN MENJADI SALAH SATU PENYANGGA PANGAN NASIONAL.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS PERTANYAAN DAN PERHATIANNYA YANG SANGAT STRATEGIS TERKAIT KESEIMBANGAN ANTARA PENGEMBANGAN WILAYAH INDUSTRI DAN PERLINDUNGAN LAHAN SAWAH PRODUKTIF DI KABUPATEN NGAWI. KAMI SANGAT MENGAPRESIASI PANDANGAN INI, MENINGAT SEKTOR PERTANIAN ADALAH TULANG PUNGGUNG EKONOMI DAN IDENTITAS KABUPATEN NGAWI, SEKALIGUS PENYANGGA PANGAN NASIONAL.

BEBERAPA LANGKAH DAN KEBIJAKAN YANG DI TEMPUH ADALAH:

- PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
- PEMANFAATAN LAHAN NON-PRODUKTIF UNTUK INDUSTRI
- PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN INTENSIF
- PROGRAM HILIRISASI PRODUK PERTANIAN
- INTEGRASI PERENCANAAN TATA RUANG



5. UNTUK MENUNJANG PERTANIAN RAMAH LINGKUNGAN BERKELANJUTAN, DAN MENJAGA EKOSISTEM LAHAN PERTANIAN, MOHON UNTUK DIBERIKAN BANTUAN KEPADA KELOMPOK KELOMPOK TANI, DIANTARANYA :
(1) PENGADAAN RUBUHA (RUMAH BURUNG HANTU)
(2) ALAT TANAM PADI, SEKARANG SANGAT DIBUTUHKAN UNTUK PERCEPATAN PROSES TANAM.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS USULANNYA, DALAM RPJMD KAMI AKAN MENGINTEGRASIKAN PROGRAM PENGADAAN DAN SOSIALISASI RUBUHA SEBAGAI BAGIAN DARI STRATEGI PERLINDUNGAN TANAMAN TERPADU. KAMI AKAN BEKERJA SAMA DENGAN KELOMPOK TANI UNTUK MENGIDENTIFIKASI LOKASI STRATEGIS PENEMPATAN RUBUHA DAN MEMBERIKAN EDUKASI MENGENAI PEMELIHARAANNYA AGAR EFEKTIF.

USULAN ALAT TANAM PADI BISA DILAKUKAN MELALUI APLIKASI SIPD YANG SEKARANG BISA DIAKSES SAMPAI TINGKAT DESA DAN POKTAN/GAPOKTAN SESUAI DENGAN ATURAN YANG BERLAKU.

IV. TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI GABUNGAN (PKS – HANURA)

1. FRAKSI GABUNGAN PKS – HANURA MERESPON CITA-CITA KABUPATEN NGAWI UNTUK 5 TAHUN KE DEPAN YANG DINYATAKAN DALAM VISI DAN MISI NYA YAITU “TERWUJUDNYA LUMBUNG PANGAN YANG MAJU, MANDIRI, DAN BERKELANJUTAN MENUJU MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI YANG SEJAHTERA, BERAKHLAK DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG.”
TEMA TERSEBUT SUDAH SEMESTINYA DIIKUTI DENGAN



KOMITMEN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR UNGGULAN, KHUSUSNYA PERTANIAN, SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI LOKAL YANG DAPAT MENOPANG KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN. INI DIMAKNAI BAHWA PEMBANGUNAN DILAKSANAKAN SECARA DINAMIS DAN BERKESINAMBUNGAN YANG BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NGAWI DENGAN MENGELOLA POTENSI YANG DIMILIKI SECARA OPTIMAL DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS APRESIASINYA, DAN PENDALAMANNYA TERHADAP VISI DAN MISI KABUPATEN NGAWI. KAMI SANGAT MENGAPRESIASI PEMAKNAAN YANG DISAMPAIKAN, BAHWA PEMBANGUNAN HARUS DILAKSANAKAN SECARA DINAMIS DAN BERKESINAMBUNGAN DENGAN TUJUAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH DEMI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.

KAMI SEPENUHNYA SETUJU BAHWA VISI INI MENUNTUT KOMITMEN KUAT PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DALAM MENGEMBANGKAN SEKTOR UNGGULAN, KHUSUSNYA PERTANIAN, SEBAGAI KEKUATAN EKONOMI LOKAL YANG MENOPANG KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SECARA BERKELANJUTAN. VISI INI TIDAK HANYA SEKADAR SLOGAN, MELAINKAN SEBUAH PANDUAN STRATEGIS YANG AKAN DITERJEMAHKAN DALAM SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN.



2. FRAKSI GABUNGAN PKS - HANURA BERHARAP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI AKAN MAMPU MENJAGA KONSISTENSI PEMBANGUNAN DALAM JANGKA PANJANG, DENGAN TETAP BERPEDOMAN PADA VISI-MISI TERSEBUT.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA. KAMI BERKOMITMEN UNTUK SELALU KONSISTEN MENJALANKAN VISI DAN MISI TERSEBUT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

3. FRAKSI GABUNGAN PKS - HANURA BERHARAP, PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH MENJADI UPAYA PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG DIMILIKI DAERAH UNTUK PENINGKATAN DAN PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT, KESEMPATAN KERJA, LAPANGAN BERUSAHA, MENINGKATKAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN DAYA SAING DAERAH SESUAI DENGAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGANNYA.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ADALAH UPAYA STRATEGIS UNTUK MENGOPTIMALKAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA YANG KITA MILIKI DEMI TERCAPAINYA PENINGKATAN DAN PEMERATAAN PENDAPATAN MASYARAKAT, PENCIPTAAN KESEMPATAN KERJA DAN LAPANGAN BERUSAHA, SERTA PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK, YANG PADA AKHIRNYA AKAN MENINGKATKAN DAYA SAING DAERAH.



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI JUGA TELAH MELAKUKAN BEBERAPA UPAYA TERKAIT PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) YANG MEMILIKI TUJUAN STRATEGIS DALAM MENCIPTAKAN PEMERATAAN KESEMPATAN KERJA ANTARA LAIN:

1. MENYUSUN PETA KETENAGAKERJAAN DAERAH YANG MELIPUTI PENDATAAN KEBUTUHAN TENAGA KERJA SESUAI DENGAN POTENSI SEKTOR UNGGULAN DAERAH SERTA MENYEDIAKAN DATA PASAR KERJA YANG AKURAT DAN REAL-TIME (MISALNYA LEWAT SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN DIGITAL).
2. PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KUALITAS TENAGA KERJA MELALUI KEGIATAN PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI (VOCATIONAL TRAINING) MELALUI BLK (BALAI LATIHAN KERJA), MENGEMBANGKAN PROGRAM SERTIFIKASI KEAHLIAN SESUAI STANDAR INDUSTRI DAN KEBUTUHAN LOCAL, MENJALIN KERJA SAMA DENGAN LEMBAGA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN.
3. MELAKUKAN FASILITASI PENEMPATAN TENAGA KERJA MELALUI LAYANAN ANTAR KERJA (JOB MATCHING) ANTARA PENCARI KERJA DAN PEMBERI KERJA.
4. MENDORONG IMPLEMENTASI JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS KETENAGAKERJAAN) DAN MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NORMA KERJA DAN UPAH MINIMUM DAERAH TERMASUK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA RENTAN, PEKERJA INFORMAL DAN MIGRAN.
4. PEMBANGUNAN ADALAH SESUATU YANG IDENTIK DENGAN PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN. AKAN TETAPI, SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN ZAMAN YANG MEMUNCULKAN INOVASI-INOVASI PEMIKIRAN,



PARADIGMA TENTANG PEMBANGUNAN PUN MENJADI TIDAK LAGI KONVENSIONAL. KAMI BERHARAP ADANYA UPAYA DALAM MENINGKATKAN NILAI-NILAI MORAL DAN ETIKA MASYARAKAT NGAWI YANG TETAP DIJAGA SEIRING DENGAN PERKEMBANGAN DAN MODERNISASI YANG TERJADI.

JAWABAN :

TERIMA KASIH SARAN DAN MASUKANNYA AKAN KAMI PERHATIKAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DALAM MENJAGA NILAI-NILAI MORAL DAN ETIKA MASYARAKAT DILAKUKAN DENGAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN YANG MENEKANKAN NILAI-NILAI MORAL DAN ETIKA, SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA MENJAGA NILAI-NILAI MORAL DAN ETIKA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA NILAI-NILAI BUDAYA DAN KEARIFAN LOKAL DENGAN MELIBATKAN SEMUA STAKEHOLDERS DI KABUPATEN NGAWI.

5. **FRAKSI GABUNGAN PKS - HANURA JUGA MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MELAKUKAN UPAYA TER-INTEGRASI DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN. JUGA RESPON CEPAT ATAS APA YANG MENJADI SUMBER KELUHAN MASYARAKAT SEPERTI PERSOALAN SAMPAH, INFRASTRUKTUR, KEAMANAN LINGKUNGAN YANG KERAP MENIMBULKAN IMPLIKASI TERHADAP MASALAH-MASALAH SOSIAL DAN HUKUM.**

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA, DAPAT KAMI SAMPAIKAN SEBAGAI BERIKUT :



1. PERLU ADANYA UPAYA PENGELOLAAN SAMPAH DI MASYARAKAT DAN SEKOLAH ADIWIYATA MELALUI METODE 3R (REDUCE, REUSE DAN RECYCLE) YANG DAPAT BERMANFAAT UNTUK MENINGKATKAN SIRKULER EKONOMI MASYARAKAT SEHINGGA DIHARAPKAN BISA MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN.
2. PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI MELALUI DINAS LINGKUNGAN HIDUP TELAH MEMFASILITASI BEBERAPA SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN SAMPAH DI MASYARAKAT MELALUI METODE 3R YAITU:
 - MEMFASILITASI PEMBANGUNAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH REDUCE-REUSE-RECYCLE (TPS3R) DIBEBERAPA KECAMATAN DI KABUPATEN NGAWI
 - MENDAMPINGI, MEMBINA DAN MEMBENTUK BANK SAMPAH DI DESA UNTUK MENGUBAH SAMPAH MENJADI SESUATU YANG LEBIH BERGUNA DAN MEMILIKI NILAI EKONOMIS, MISALNYA MELAKUKAN PEMILAHAN SAMPAH, MEMBUAT KERAJINAN TANGAN DAN ECOBRIK DARI SAMPAH PLASTIK, MEMBUAT PUPUK/KOMPOS DAN LAIN-LAIN.
 - MEMBERIKAN BANTUAN SARANA PRASARANA PENGOLAHAN SAMPAH UNTUK BANK SAMPAH BERUPA TIMBANGAN DIGITAL DAN MESIN JAHIT KARUNG.
 - MEMBERIKAN SOSIALISASI, PEMBEKALAN DAN PELATIHAN KEPADA MASYARAKAT DESA TERKAIT PEMBENTUKAN BANK SAMPAH DAN TATA CARA PENGELOLAAN SAMPAHNYA BAIK DALAM PROSES PENGUMPULAN, PEMILAHAN, PENIMBANGAN,



PENJUALAN, MAUPUN PEMROSESAN SAMPAH LAINNYA.

TPS 3R DAN BANK SAMPAH PENTING UNTUK MASYARAKAT KARENA HASIL DARI PENGELOLAAN SAMPAHNYA BISA DIJUAL UNTUK MENINGKATKAN SIRKULER EKONOMI MASYARAKAT.

KEMUDIAN UNTUK MASALAH KEAMANAN LINGKUNGAN, PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI MELALUI SATPOL PP TELAH BERUSAHA UNTUK MEMBERIKAN RESPON CEPAT ATAS KELUHAN MASYARAKAT. PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI JUGA TELAH MENYEDIAKAN FASILITAS PENGADUAN/LAPORAN BAIK MELALUI MEDIA KONVENSIONAL (LAPORAN LANGSUNG KE KANTOR SATPOL PP) MAUPUN PENGADUAN SECARA ELEKTRONIK (TELEPON, MEDIA SOSIAL SEPERTI: INSTAGRAM, FACEBOOK DSB) AGAR SATUAN TUGAS TRANTIBUM LINMAS SATPOL PP KABUPATEN NGAWI DAPAT SEGERA MELAKUKAN TINDAKAN YANG DIPERLUKAN DALAM UPAYA MENJAGA KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT.

V. TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI GABUNGAN (PAN - DEMOKRAT)

1. DPRD TELAH MEMBETUK PANSUS UNTUK MEMBAHAS RANPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029. TERHADAP RANPERDA TERSEBUT, FRAKSI GABUNGAN PAN-DEMOKRAT BERPANDANGAN BAHWA SECARA UMUM RANCANGANNYA SISTEMATIS, AKADEMIS, IDEALIS DAN REALISTIS. SELANJUTNYA TINGGAL BAGAIMANA ENTITAS PEMBANGUNAN DALAM JANGKA WAKTU 5 TAHUN KEDEPAN MAMPU MEMAHAMI,



MENERJEMAHKAN SERTA MENGIMPLEMENTASIKAN VISI-MISI KE ARAH KONDISI NGAWI YANG INGIN DICAPAI SAMPAI AKHIR PERIODE.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA, PEMKAB NGAWI BERKOMITMEN UNTUK SECARA KONSISTEN MENGIMPLEMENTASIKAN VISI MISI DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TAHUN 2025-2029 SESUAI DENGAN YANG TELAH DIRUMUSKAN DALAM RPJMD SERTA MENGAWAL IMPLEMENTASINYA PADA DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN YAITU RKPD.

2. SEJAK TAHUN 2021, NGAWI DIKENAL SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL. PERAN NGAWI SANGAT SIGNIFIKAN DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN. PRODUKSI PADI YANG TINGGI DAN SURPLUSNYA BERAS MENJADIKAN NGAWI SEBAGAI PENYANGGA KEBUTUHAN PANGAN NASIONAL. TETAPI IRONISNYA, HASIL IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS DALAM RANCANGAN RPJMD YAITU UNTUK URUSAN PANGAN, TERDAPAT MASALAH : "KETERSEDIAAN PANGAN BAGI MASYARAKAT MASIH BELUM OPTIMAL; POTENSI KERAWANAN PANGAN MASIH ADA; CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD) BELUM SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN; DAN MASIH TINGGINYA DESA RAWAN PANGAN". ARTINYA DISTRIBUSI KEADILAN KEUNTUNGAN BELUM MERATA, KARENA SEBAGIAN WARGA KABUPATEN NGAWI MASIH ADA POTENSI KEKURANGAN PANGAN DI TENGAH STATUSNYA SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL



JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS PANDANGAN YANG KRUSIAL DAN MENDALAM MENGENAI IRONI KETAHANAN PANGAN DI NGAWI. APA YANG FRAKSI SOROTI ADALAH INTI DARI TANTANGAN YANG LEBIH BESAR: BAGAIMANA KITA MEMASTIKAN STATUS NGAWI SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL BENAR-BENAR DITERJEMAHKAN MENJADI KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN PANGAN YANG MERATA BAGI SELURUH WARGANYA.

KAMI MEMAHAMI BETUL BAHWA DI BALIK ANGKA PRODUKSI PADI YANG SURPLUS DAN PERAN SIGNIFIKAN NGAWI SEBAGAI PENYANGGA PANGAN NASIONAL, MASIH TERDAPAT REALITAS PAHIT BERUPA KETERSEDIAAN PANGAN YANG BELUM OPTIMAL BAGI SEBAGIAN MASYARAKAT, POTENSI KERAWANAN PANGAN, CPPD YANG BELUM SESUAI KETENTUAN, DAN MASIH TINGGINYA DESA RAWAN PANGAN. INI ADALAH PARADOKS YANG HARUS KITA HADAPI DAN SELESAIKAN BERSAMA.

FENOMENA INI MEMANG MENGINDIKASIKAN BAHWA DISTRIBUSI KEADILAN DARI KEUNTUNGAN STATUS LUMBUNG PANGAN NASIONAL BELUM SEPENUHNYA MERATA. ARTINYA, MESKIPUN PRODUKSI MELIMPAH, TIDAK SEMUA WARGA NGAWI MEMILIKI AKSES YANG MEMADAI TERHADAP PANGAN, BAIK DARI SEGI KETERSEDIAAN FISIK, DAYA BELI, MAUPUN PEMANFAATAN.

RPJMD INI DIRANCANG DENGAN KESADARAN PENUH AKAN IRONI TERSEBUT DAN BERKOMITMEN UNTUK MENGATASI DISPARITAS INI MELALUI PENDEKATAN YANG LEBIH HOLISTIK.



- OPTIMALISASI TATA NIAGA PANGAN LOKAL
 - PENGUATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH (CPPD)
 - IDENTIFIKASI DAN INTERVENSI DESA RAWAN PANGAN
 - EDUKASI GIZI DAN PEMANFAATAN PANGAN
 - SINERGI LINTAS SEKTOR
3. PADA URUSAN PENANAMAN MODAL, TERDAPAT ISU STRATEGIS TERKAIT MASALAH : “RENDAHNYA MINAT INVESTOR; BELUM ADANYA KEPASTIAN HUKUM; PROSES PELAYANAN PENANAMAN MODAL MASIH KURANG EFEKTIF; KURANGNYA DATA DAN INFORMASI POTENSI DAERAH YANG DIBUTUHKAN PELAKU USAHA; BELUM SELARASNYA PERATURAN PERIZINAN PUSAT DAN DAERAH; DAN INVESTOR BELUM MENGETAHUI TENTANG KEUNTUNGAN INVESTASI DI NGAWI”. TETAPI FAKTANYA INVESTOR SUDAH BANYAK YANG MASUK KABUPATEN NGAWI.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS OBSERVASI KRITIS DARI FRAKSI, TERUTAMA MENGENAI ISU STRATEGIS DALAM URUSAN PENANAMAN MODAL YANG TERIDENTIFIKASI DALAM RANCANGAN RPJMD.

KAMI SEPENDAPAT DENGAN FAKTA YANG DISAMPAIKAN BAHWA INVESTOR SUDAH BANYAK YANG MASUK KABUPATEN NGAWI. INI MENUNJUKKAN BAHWA DI TENGAH IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS TERSEBUT, NGAWI MEMILIKI DAYA TARIK DAN POTENSI YANG KUAT, SEHINGGA MAMPU MENARIK INVESTASI RIIL.

PARADOKS INI JUSTRU MENJADI MOTIVASI UTAMA BAGI PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI UNTUK TERUS BERBENAH DAN MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN



PENANAMAN MODAL. KEBERHASILAN MENARIK INVESTOR YANG SUDAH ADA MEMBUKTIKAN BAHWA POTENSI KITA BESAR, NAMUN IDENTIFIKASI ISU STRATEGIS ADALAH PENGINGAT BAHWA KITA TIDAK BOLEH BERPUAS DIRI. RPJMD INI, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN FAKTA DAN TANTANGAN TERSEBUT, BERFOKUS PADA STRATEGI SEBAGAI BERIKUT:

- PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN DAN KEPASTIAN HUKUM
- PENINGKATAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PENANAMAN MODAL
- PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI POTENSI DAERAH YANG KOMPREHENSIF.
- PROMOSI DAN PEMASARAN INVESTASI YANG BERTARGET
- PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TERENCANA

DENGAN MENGIDENTIFIKASI DAN SECARA PROAKTIF MENGATASI ISU-ISU STRATEGIS INI, MESKIPUN DI TENGAH FAKTA MASUKNYA BANYAK INVESTOR, KAMI YAKIN DAPAT MENINGKATKAN DAYA TARIK NGAWI SECARA SIGNIFIKAN. TUJUAN AKHIRNYA ADALAH MENCIPTAKAN EKOSISTEM INVESTASI YANG LEBIH ROBUST, ADIL, DAN MEMBERIKAN MANFAAT MAKSIMAL BAGI PERTUMBUHAN EKONOMI SERTA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NGAWI.

4. KAMI BERPANDANGAN BAHWA KEDEPAN URUSAN PERTANIAN DAN PANGAN, SERTA PENANAMAN MODAL DAN INDUSTRI AKAN MENJADI PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN BAGI PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DALAM HAL INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN



WILAYAH, KAWASAN INDUSTRI, PELAYANAN PERIZINAN DAN FASILITASI, SERTA PENGELOLAANNYA.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS PANDANGANNYA YANG SANGAT TAJAM DAN STRATEGIS. KAMI SEPENUHNYA SEPENDAPAT BAHWA KE DEPAN, URUSAN PERTANIAN DAN PANGAN, SERTA PENANAMAN MODAL DAN INDUSTRI AKAN MENJADI PELUANG SEKALIGUS TANTANGAN BESAR BAGI PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI, KHUSUSNYA DALAM HAL INFRASTRUKTUR, TATA RUANG DAN WILAYAH, PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI, EFEKTIVITAS PELAYANAN PERIZINAN DAN FASILITASI, SERTA KESELURUHAN PENGELOLAANNYA.

HAL INI SANGAT RELEVAN DAN AKAN MENJADI PONDASI BAGI KAMI DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM DI MASA MENDATANG.

KAMI MEYAKINI BAHWA KEDUA SEKTOR INI—PERTANIAN DAN INDUSTRI—BUKANLAH PILIHAN YANG HARUS SALING MENGORBANKAN, MELAINKAN DAPAT SALING MELENGKAPI DAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN NGAWI.

RPJMD INI DIRANCANG UNTUK:

- MEMBANGUN INFRASTRUKTUR YANG MENDUKUNG KEDUA SEKTOR SECARA SEIMBANG.
- MERUMUSKAN TATA RUANG DAN WILAYAH YANG ADAPTIF NAMUN TETAP MENJAGA KEBERLANJUTAN.
- MENGEMBANGKAN KAWASAN INDUSTRI DENGAN PRINSIP KEBERLANJUTAN.
- MENYEDIAKAN PELAYANAN PERIZINAN DAN FASILITASI YANG PRIMA UNTUK MENARIK INVESTASI SEKALIGUS MELINDUNGI SEKTOR PANGAN.



- MENERAPKAN PENGELOLAAN YANG PROFESIONAL DAN TRANSPARAN DI SEMUA LINI.

DENGAN PEMAHAMAN YANG TAJAM MENGENAI PELUANG DAN TANTANGAN INI, KAMI OPTIMIS BAHWA RPJMD AKAN MENJADI PANDUAN YANG EFEKTIF UNTUK MENGELOLA POTENSI NGAWI SECARA OPTIMAL, MEMBAWA DAERAH INI MENUJU KEMAJUAN YANG BERKELANJUTAN DAN KESEJAHTERAAN YANG MERATA BAGI SELURUH MASYARAKAT.

5. KAMI JUGA MENCERMATI ISU STRATEGIS MASALAH SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BAIK PELAKSANA PROGRAM MAUPUN OBJEK PROGRAM PEMBANGUNAN. MASALAH SDM AKAN MENJADI TANTANGAN TERSENDIRI UNTUK MEWUJUDKAN VISI : "MAJU, MANDIRI, BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, DAN BERAKHLAK". PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI HARUS MENYIAPKAN SDM YANG KOMPETEN-MUMPUNI-UNGGUL, YANG TIDAK HANYA PAHAM ADMINISTRASI SPJ UNTUK TARGET WTP, TETAPI JUGA PAHAM REGULASI, PAHAM KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI, PAHAM IT, PAHAM SITUASI TERKINI DAN MAMPU MENGEKSEKUSI. SEHINGGA VISI "SEMESTA BERENCANA" DAPAT TERWUJUD.

JAWABAN :

SALAH SATU TANTANGAN STRATEGIS YANG DIHADAPI PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DALAM MEWUJUDKAN VISI "MAJU, MANDIRI, BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, DAN BERAKHLAK" ADALAH KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM). TANTANGAN INI TIDAK HANYA MENYANGKUT SDM SEBAGAI PELAKSANA PROGRAM PEMBANGUNAN, TETAPI JUGA SDM SEBAGAI OBJEK PEMBANGUNAN ITU SENDIRI.



DALAM KONTEKS INI, KAMI PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BERKOMITMEN UNTUK MENYIAPKAN SDM YANG KOMPETEN, MUMPUNI, DAN UNGGUL, DENGAN PROFIL SEBAGAI BERIKUT:

1. MENGUASAI REGULASI DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
2. MAHIR DALAM KOMUNIKASI DAN PUBLIKASI KEBIJAKAN KEPADA PUBLIK SECARA PERSUASIF DAN TRANSPARAN,
3. MEMILIKI LITERASI DIGITAL, INOVASI DAN PENGUASAAN TEKNOLOGI INFORMASI (IT) UNTUK EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS KERJA,
4. MEMPUNYAI KAPABILITAS EKSEKUSI TERHADAP KEBIJAKAN SECARA CEPAT DAN TEPAT
6. TERKAIT PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUSI, FRAKSI GABUNGAN PAN-DEMOKRAT SANGAT SETUJU, MENINGAT PERDA TERSEBUT SUDAH TIDAK RELEVAN DAN BERTENTANGAN DENGAN PERUDANG-UNDANGAN DIATASNYA SERTA TIDAK SESUAI DENGAN KEPENTINGAN UMUM, SEPERTI MENGANGGU INVESTASI DAN IKLIM USAHA, MENGHAMBAT PERTUMBUHAN SEKTOR KONSTRUKSI DAN BERDAMPAK PADA BIAYA TINGGI TERHADAP PELAKU USAHA.

JAWABAN :

KEBIJAKAN PENCABUTAN PERDA NO 18 TAHUN 2013 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH KONDUSIF.



7. KAMI MENGAPRESIASI KINERJA TIM PENYUSUN YANG TELAH MENYELESAIKAN RANPERDA RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029 DARI TAHAP PERENCANAAN HINGGA PARIPURNA.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS APRESIASINYA. PEMKAB NGAWI BERKOMITMEN MEMATUHI TIMELINE DAN PROSEDUR PENYUSUNAN RPJMD SESUAI DENGAN PERMENDAGRI NO. 86/2017 DAN INMENDAGRI NO. 2/2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA TAHUN 2025-2029.

8. PADA VISI RPJMD TAHUN 2025-2029, DIAWALI DENGAN DIKSI YANG SAMA SEPERTI PERIODE SEBELUMNYA, YAITU "SEMESTA BERENCANA", TETAPI TIDAK DIURAIKAN. UNTUK ITU, MOHON PENJELASAN AGAR PUBLIK JUGA MEMAHAMI APA MAKNA "SEMESTA BERENCANA" TERSEBUT ?

JAWABAN :

SEMESTA BERENCANA MERUPAKAN LANDASAN BAGI PEMBANGUNAN YANG MENYELURUH, TIDAK HANYA MENITIKBERATKAN PADA PEMBANGUNAN FISIK SEMATA, TETAPI JUGA PEMBANGUNAN YANG MENCAKUP PEMBANGUNAN MENTAL ATAU KARAKTER BANGSA.

PEMBANGUNAN YANG MENYELURUH DIAWALI DENGAN SUATU PERENCANAAN YANG MENYELURUH YAITU DENGAN TERLEBIH DAHULU MELAKUKAN INVENTARISASI SECARA MENYELURUH TERHADAP PERMASALAHAN YG ADA. KEMUDIAN MERENCANAKAN PEMBANGUNAN DENGAN MELIBATKAN SELURUH ELEMEN MASYARAKAT DALAM MERENCANAKAN SESUAI SKALA PRIORITAS. DENGAN DEMIKIAN MAKA PEMBANGUNAN YANG



DILAKUKAN AKAN EFEKTIF, TEPAT SASARAN, DAN PRODUKTIF MENUJU MASYARAKAT YANG ADIL, SEJAHTERA, DAN MERATA.

9. VISI RPJMD DIANTARA FOKUSNYA ADALAH "TERWUJUDNYA LUMBUNG PANGAN NASIONAL". UNTUK MEMPERTAHANKAN STATUS SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL, MOHON DIJELASKAN PROGRAM APA SAJA YANG AKAN DILAKSANAKAN DARI TAHUN 2025 HINGGA 2029, SERTA BERAPA HEKTAR PROYEKSI LUAS PANEN PADI DAN BERAPA TON PROYEKSI PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PADI PER-TAHUNNYA.

JAWABAN :

PROYEKSI LUAS PANEN TANAMAN PADI DI KABUPATEN NGAWI PADA TAHUN 2025 ADALAH SEBESAR 138.549 HA, TAHUN 2026 ADALAH SEBESAR 138.349 HA, TAHUN 2027 ADALAH SEBESAR 138.211 HA, TAHUN 2028 ADALAH SEBESAR 138.072 HA DAN PROYEKSI LUAS PANEN TAHUN 2029 ADALAH SEBESAR 137.934 HA.

SEDANGKAN UNTUK PROYEKSI PENINGKATAN PRODUKSI TANAMAN PADI PER TAHUN ADALAH PADA TAHUN 2025 PRODUKSI PADI SEBESAR 895.640 TON GKG, PADA TAHUN 2026 SEBESAR 895.117 TON GKG, PADA TAHUN 2027 SEBESAR 896.986 TON GKG, PADA TAHUN 2028 ADALAH 898.851 TON GKG, DAN PRODUKSI PADI TAHUN 2029 ADALAH SEBESAR 899.331 TON GKG.

ADAPUN PROGRAM YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2025-2029 ADALAH:

- PROGRAM BANTUAN BENIH, SAPRODI PERTANIAN,
- PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI,
- JARINGAN IRIGASI TERSIER



- PENGEMBANGAN LUMBUNG MOL/POC (BAHAN ORGANIK CAIR/PUPUK ORGANIK CAIR) DI SETIAP DESA
 - PENINGKATAN PROVITAS KOMODITAS PADI
 - PENINGKATAN KESUBURAN TANAH MELALUI PRLB
10. MOHON PENJELASAN, APA LANGKAH STRATEGIS PEMERINTAH UNTUK DAPAT MEMPROTEKSI LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF, AGAR KEDEPAN TIDAK TERGUSUR MENJADI LAHAN INDUSTRI DAN PERUMAHAN, MENINGAT INVESTOR TENTUNYA JUGA MEMBUTUHKAN LOKASI STRATEGIS UNTUK INVESTASI ?

JAWABAN :

ISU PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PRODUKTIF DARI KONVERSI MENJADI LAHAN INDUSTRI DAN PERUMAHAN ADALAH TANTANGAN BESAR, TERUTAMA MENINGAT KEBUTUHAN INVESTOR AKAN LOKASI STRATEGIS. PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI SANGAT MENYADARI URGENSI INI DAN TELAH MERUMUSKAN LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS UNTUK MEMPROTEKSI LAHAN PERTANIAN, SEKALIGUS TETAP MEMBUKA PINTU BAGI INVESTASI YANG BERKELANJUTAN.

KAMI MEMANDANG BAHWA PEMBANGUNAN INDUSTRI DAN PERUMAHAN HARUS BERJALAN SEIRING DENGAN PELESTARIAN FUNGSI LAHAN PERTANIAN SEBAGAI PENOPANG KETAHANAN PANGAN DAN EKONOMI LOKAL. INI BUKAN PILIHAN Biner ANTARA PERTANIAN ATAU INDUSTRI, MELAINKAN BAGAIMANA KITA BISA MENCAPAI HARMONI DAN KESEIMBANGAN.

UNTUK PERIJINAN TERKAIT PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG [PKKPR] TELAH DILAKUKAN PENILAIAN SECARA BERJENJANG DAN KONPREHENSIP MENDASAR KEBIJAKAN LINTAS SEKTOR



OLEH FORUM PENATAAN RUANG [FPR] YANG DIDALAM TIM TERDAPAT TIM DARI INSTANSI YANG MEMBIDANGI SEKTOR PERTANIAN. DAN SETIAP PENILAIAN SELALU MENDASAR KEBIJAKAN2 SEKTORAL DI BIDANG PERTANIAN SEPERTI KP2B, LP2B (LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN) DAN LSD (LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI)

BERIKUT ADALAH LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG KAMI TEMPUH:

- 1) PENETAPAN DAN PENEGAKAN KEBIJAKAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
- 2) PRIORITAS PEMANFAATAN LAHAN NON-PRODUKTIF UNTUK INDUSTRI DAN PERUMAHAN
- 3) PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI TERPADU DAN TERENCANA
- 4) PENINGKATAN PRODUKTIVITAS PERTANIAN INTENSIF
- 5) FASILITASI PENINGKATAN KESUBURAN TANAH LAHAN PERTANIAN

11. **MOHON PENJELASAN APAKAH PEMERINTAH DAERAH TELAH MEMILIKI PETA 'KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI' DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI ?**

JAWABAN :

PETA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DITUANGKAN DALAM PERDA NO 11 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN NGAWI TAHUN 2021-2041 YANG TERDIRI DARI:

1. KECAMATAN GENENG
2. KECAMATAN KARANGJATI
3. KECAMATAN KASREMAN
4. KECAMATAN KEDUNGGALAR



5. KECAMATAN NGAWI
 6. KECAMATAN PARON
 7. KECAMATAN PITU
 8. KECAMATAN WIDODAREN
 9. KECAMATAN KARANGANYAR
12. TERKAIT ISU STRATEGIS MASALAH "POTENSI KERAWANAN PANGAN DAN DESA RAWAN PANGAN" DI WILAYAH KABUPATEN NGAWI, MOHON PENJELASAN APAKAH TELAH DIPETAKAN? DAN APA RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI UNTUK MENGANTISIPASINYA?

JAWABAN :

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI TELAH MEMETAKAN POTENSI KERAWANAN PANGAN DAN DESA RAWAN PANGAN. RENCANA STRATEGIS YANG DISUSUN MENCAKUP UPAYA PENINGKATAN PRODUKSI, DIVERSIFIKASI PANGAN, PERBAIKAN INFRASTRUKTUR PERTANIAN, SERTA PENGUATAN CADANGAN DAN DISTRIBUSI PANGAN.

13. MOHON PENJELASAN APA LANGKAH-LANGKAH PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI UNTUK MENYIAPKAN SDM YANG KOMPETEN-MUMPUNI-UNGGUL, SEHINGGA DAPAT MEMAHAMI DAN MAMPU MENGEKSEKUSI VISI RPJMD ?

JAWABAN :

LANGKAH-LANGKAH YANG KAMI LAKUKAN ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

1. MELAKUKAN SOSIALISASI RPJMD AGAR SEMUA ASN MAUPUN STAKEHOLDER MEMAHAMI PERAN Masing-Masing



2. SELURUH KEPALA PERANGKAT DAERAH MEMAHAMKAN SELURUH ASN DI PERANGKAT DAERAHNYA AGAR MENGETAHUI INDIKATOR KINERJA YANG HARUS DI CAPAI
3. MELAKUKAN MONITORING DAN EVALUASI SECARA BERKELANJUTAN TERHADAP CAPAIAN DARI TARGET-TARGET YANG SUDAH DI TENTUKAN
4. PENGUATAN KAPASITAS SDM MELALUI PENDIDIKAN PELATIHAN DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI
5. MENYELENGGARAKAN PELATIHAN BERBASIS KEBUTUHAN NYATA LAPANGAN, SEPERTI BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN, PELATIHAN KOMUNIKASI PUBLIK DAN DISEMINASI KEBIJAKAN, PELATIHAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN TRANSFORMASI DIGITAL,
6. MENINGTEGRASIKAN PELATIHAN KLASIKAL DAN NON-KLASIKAL (E-LEARNING, COACHING, MENTORING).
7. MELAKSANAKAN SERTIFIKASI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DAN TEKNIS.
8. MELAKSANAKAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN BAGI PEJABAT STRUKTURAL
9. MELAKSANAKAN PELATIHAN DASAR BAGI CASN

VI. TANGGAPAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI PDI PERJUANGAN

1. FRAKSI PDI PERJUANGAN MENEKANKAN PENTINGNYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI RPJMD DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN NGAWI, SERTA RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL. RPJMD JUGA HARUS



SELARAS DENGAN PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT YANG RELEVAN.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA. PEMKAB NGAWI TELAH MELAKUKAN PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJPD KAB. NGAWI TAHUN 2025-2045 SERTA RPJMN TERUTAMA DUKUNGAN TERHADAP ASTA CITA PRESIDEN SEHINGGA DAPAT MELAKSANAKAN PROGRAM-PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DAN KEBIJAKAN PUSAT YANG RELEVAN DENGAN POTENSI DAN KARAKTERISTIK DAERAH KABUPATEN NGAWI.

2. SALAH SATU CONTOH PROGRAM KETAHANAN PANGAN, KABUPATEN NGAWI DIKENAL SALAH SATU LUMBUNG PANGAN KHUSUSNYA PADI, DI TINGKAT JAWA TIMUR DAN NASIONAL. KABUPATEN NGAWI MENDUDUKI PERINGKAT KEDUA PENGHASIL BERAS TERBANYAK DI JAWA TIMUR. SELAIN ITU KABUPATEN NGAWI JUGA PERNAH MENJADI SALAH SATU DAERAH DENGAN SURPLUS GABAH TERTINGGI DI INDONESIA SETELAH KABUPATEN KARAWANG.

UNTUK ITU SANGAT DIHARAPKAN INVESTOR DI BIDANG PANGAN MASUK DI KABUPATEN NGAWI YANG DAPAT MENDUKUNG PENUH VISI DAN MISI BUPATI, ANTARA LAIN :

- a) INVESTOR YANG BISA MENERIMA SEKALIGUS MEMBELI HASIL PANEN DARI PARA PETANI.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARANNYA, DALAM CATATAN KAMI SUDAH ADA BEBERAPA INVESTOR DI BIDANG



PANGAN TERUTAMA PENGGILINGAN PADI BESAR YANG SIAP MENAMPUNG HASIL PANEN PETANI. DAN KAMI TERUS BERUPAYA MENGAET INVESTOR DI BIDANG PANGAN DAN PERTANIAN AGAR MENDONGKRAK NILAI TAMBAH PASKA PANEN.

- b) **MEMPERMUDAH HASIL PENJUALAN PANEN SEHINGGA PARA PETANI MERASA DIPERHATIKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH DALAM MASA PANEN RAYANYA.**

JAWABAN :

PEMERINTAH MELALUI BULOG SIAP MENERIMA HASIL PANEN PETANI, SELAIN ITU JUGA ADA BANYAK PENGGILINGAN PADI BESAR YANG BERMITRA DENGAN PETANI SEHINGGA UNTUK PENJUALAN HASIL PANEN BISA MELALUI BULOG DAN JUGA PENGGILINGAN PADI BESAR YANG ADA.

3. **FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMINTA AGAR RPJMD INI MEMUAT PRIORITAS PEMBANGUNAN YANG JELAS DAN TERUKUR, DENGAN MEMPERTIMBANGKAN POTENSI DAN KARAKTERISTIK DAERAH.**

PRIORITAS PEMBANGUNAN HARUS DIARAHKAN PADA UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT, PENGURANGAN KEMISKINAN, PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN, SERTA PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN.

JAWABAN :

PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN HARUS MENJADI SALAH SATU PRIORITAS UTAMA DALAM ARAH PEMBANGUNAN DAERAH. UPAYA INI MELIPUTI:

1. **PENINGKATAN KOMPETENSI DAN KESEJAHTERAAN TENAGA PENDIDIK, AGAR GURU DAN TENAGA**



KEPENDIDIKAN DAPAT MENJALANKAN PERAN SECARA PROFESIONAL DAN OPTIMAL.

2. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN YANG LAYAK DAN MERATA, TERMASUK FASILITAS BELAJAR, PERPUSTAKAAN, DAN AKSES TEKNOLOGI INFORMASI.
3. PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN YANG ADIL DAN INKLUSIF, TERUTAMA BAGI KELOMPOK MASYARAKAT MARGINAL, DAERAH TERPENCIL, DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS.
4. PENGUATAN KURIKULUM YANG RELEVAN DENGAN KEBUTUHAN ZAMAN, TERMASUK PENANAMAN NILAI-NILAI KARAKTER, LITERASI DIGITAL, DAN KETERAMPILAN ABAD 21.
5. KOLABORASI DENGAN BERBAGAI PEMANGKU KEPENTINGAN, TERMASUK LEMBAGA PENDIDIKAN SWASTA, PESANTREN, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT DALAM MENCIPTAKAN EKOSISTEM PENDIDIKAN YANG MENDUKUNG.

MELALUI LANGKAH-LANGKAH TERSEBUT, DIHARAPKAN PENDIDIKAN DI DAERAH TIDAK HANYA MAMPU MENCETAK LULUSAN YANG CERDAS SECARA AKADEMIK, TETAPI JUGA BERKARAKTER, BERDAYA SAING, DAN SIAP MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL.

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI JUGA TERUS BERUPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN, YAITU DENGAN MENAMBAH KOMPENSI TENAGA, PENAMBAHAN SARANA DAN PRASARANA SERTA ALAT KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI. SELAIN ITU AKAN



DILAKUKAN STRATEGI PENYEBARAN TEMPAT FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

4. **FRAKSI PDI PERJUANGAN JUGA MENYOROTI PENTINGNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN.**

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA, AKAN MENJADI PERHATIAN.

5. **RPJMD HARUS MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS PADA UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH, MELALUI PENGEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN DAN PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF.**

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS MASUKANNYA. KAMI SEPENUHNYA SEPAKAT BAHWA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) HARUS MEMBERIKAN PERHATIAN KHUSUS PADA UPAYA PENINGKATAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH, DAN HAL INI AKAN DICAPAI MELALUI PENGEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN SERTA PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF.

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN KABUPATEN NGAWI SELAMA LIMA TAHUN KE DEPAN MEMANG DIARAHKAN UNTUK MEMPERKUAT POSISI EKONOMI DAERAH, DAN DAYA SAING ADALAH KUNCI UNTUK MENCAPAI TUJUAN TERSEBUT. DALAM RPJMD INI, KOMITMEN KAMI UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING EKONOMI DAERAH TERCERMIN DALAM STRATEGI SEBAGAI BERIKUT:

1. **PENGEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR UNGGULAN**

KAMI TELAH MENGIDENTIFIKASI SEKTOR-SEKTOR YANG MEMILIKI POTENSI TERBESAR UNTUK



MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI DAN MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH DI NGAWI:

- SEKTOR PERTANIAN: SEBAGAI LUMBUNG PANGAN NASIONAL, SEKTOR PERTANIAN TETAP MENJADI PRIORITAS UTAMA. PENINGKATAN DAYA SAING DI SEKTOR INI AKAN DIFOKUSKAN PADA: MODERNISASI PERTANIAN, HILIRISASI PRODUK PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN KLASSTER PERTANIAN
- SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN: KAMI AKAN MENDORONG PENGEMBANGAN INDUSTRI PENGOLAHAN YANG MEMILIKI KETERKAITAN DENGAN POTENSI LOKAL, TERUTAMA INDUSTRI YANG MENGOLAH HASIL PERTANIAN NGAWI. INI AKAN MENCIPTAKAN DIVERSIFIKASI EKONOMI DAN MENYERAP TENAGA KERJA.
- SEKTOR PARIWISATA: OPTIMALISASI POTENSI PARIWISATA ALAM DAN BUDAYA UNTUK MENARIK PENGUNJUNG, YANG PADA GILIRANNYA AKAN MENGGERAKKAN SEKTOR JASA DAN UMKM LOKAL.

2. PENCIPTAAN IKLIM INVESTASI YANG KONDUSIF

INVESTASI ADALAH MOTOR PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI. OLEH KARENA ITU, KAMI AKAN FOKUS PADA:

- PENYEDERHANAAN PERIZINAN DAN PELAYANAN PRIMA: KAMI BERKOMITMEN UNTUK TERUS MENYEMPURNAKAN SISTEM PELAYANAN PERIZINAN INVESTASI AGAR LEBIH CEPAT, TRANSPARAN, DAN EFISIEN. DIGITALISASI DAN INTEGRASI LAYANAN SATU PINTU AKAN MENJADI PRIORITAS UNTUK MEMUDAHKAN INVESTOR.



- KEPASTIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN YANG STABIL: MEMASTIKAN KERANGKA REGULASI YANG JELAS, KONSISTEN, DAN PREDIKTIF BAGI INVESTOR, SERTA MENGHINDARI PERUBAHAN KEBIJAKAN YANG MENDADAK. INI SANGAT PENTING UNTUK MEMBANGUN KEPERCAYAAN INVESTOR.
- PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR YANG MEMADAI: MEMBANGUN DAN MENINGKATKAN KUALITAS INFRASTRUKTUR DASAR SEPERTI JALAN, LISTRIK, AIR BERSIH, SANITASI, DAN AKSES INTERNET YANG MENDUKUNG KEGIATAN EKONOMI DAN INDUSTRI. PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI YANG TERENCANA DENGAN FASILITAS LENGKAP JUGA MENJADI BAGIAN DARI UPAYA INI.
- PROMOSI POTENSI DAERAH YANG EFEKTIF: SECARA PROAKTIF MEMPROMOSIKAN KEUNGGULAN KOMPARATIF DAN KOMPETITIF NGAWI KEPADA INVESTOR POTENSIAL, BAIK DI TINGKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL. INI TERMASUK PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI POTENSI YANG AKURAT DAN MUDAH DIAKSES.
- KETERSEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BERKUALITAS: MENGEMBANGKAN SDM YANG TERAMPIL DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN INDUSTRI MELALUI PENDIDIKAN VOKASI DAN PROGRAM PELATIHAN KERJA, SEHINGGA INVESTOR TIDAK KESULITAN Mencari tenaga kerja yang kompeten.

DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN STRATEGI-STRATEGI INI SECARA KONSISTEN, KAMI YAKIN RPJMD AKAN MENJADI INSTRUMEN EFEKTIF UNTUK MENINGKATKAN



DAYA SAING EKONOMI DAERAH, MENJADIKAN NGAWI SEBAGAI DESTINASI INVESTASI YANG MENARIK, DAN PADA AKHIRNYA, MEMBAWA KESEJAHTERAAN YANG LEBIH BESAR BAGI SELURUH MASYARAKAT.

6. **FRAKSI PDI PERJUANGAN MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK LEBIH PROAKTIF DALAM MENARIK INVESTASI, BAIK DARI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI.**

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA, KAMI SEPAKAT BAHWA PEMERINTAH DAERAH PERLU LEBIH PROAKTIF DALAM MENARIK INVESTASI, BAIK DARI DALAM MAUPUN LUAR NEGERI. INI ADALAH KUNCI UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN EKONOMI, MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, DAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT NGAWI.

KAMI MENYADARI BAHWA DI TENGAH PERSAINGAN ANTAR DAERAH DALAM MENARIK INVESTASI, DIPERLUKAN STRATEGI YANG LEBIH AGRESIF DAN TERARAH. RPJMD INI DIRANCANG DENGAN KOMITMEN UNTUK MEMPERKUAT PERAN PEMERINTAH DAERAH SEBAGAI FASILITATOR DAN PROMOTOR INVESTASI UTAMA.

BERIKUT ADALAH BEBERAPA LANGKAH PROAKTIF YANG AKAN KAMI LAKUKAN:

1. **PENINGKATAN PROMOSI DAN PEMASARAN INVESTASI YANG BERTARGET**
YAITU DENGAN ROADSHOW DAN FORUM INVESTASI, MEDIA DIGITAL DAN PUBLIKASI MULTIBAHASA DAN IDENTIFIKASI TARGET INVESTOR



2. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DAN FASILITASI INVESTOR: LAYANAN SATU PINTU (PTSP) YANG EFEKTIF
LAYANAN SATU PINTU (PTSP) YANG EFEKTIF, PENDAMPINGAN INVESTOR (INVESTOR RELATION UNIT) DAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN INVESTOR
3. PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI POTENSI INVESTASI YANG LENGKAP
YAITU DENGAN PETA POTENSI INVESTASI DIGITAL DAN STUDI KELAYAKAN AWAL
4. PERBAIKAN IKLIM USAHA DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG
YAITU DENGAN HARMONISASI REGULASI, PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI
7. PEMERINTAH DAERAH JUGA PERLU MEMBERIKAN DUKUNGAN PENUH KEPADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI TULANG PUNGGUNG PEREKONOMIAN DAERAH.

JAWABAN :

KAMI SEPAKAT BAHWA PEMERINTAH DAERAH PERLU MEMBERIKAN DUKUNGAN PENUH KEPADA PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) SEBAGAI TULANG PUNGGUNG PEREKONOMIAN DAERAH. UMKM ADALAH SEKTOR VITAL YANG TIDAK HANYA MENJADI SUMBER PENGHASILAN BAGI SEBAGIAN BESAR MASYARAKAT, TETAPI JUGA MEMILIKI PERAN KRUSIAL DALAM MENCIPTAKAN LAPANGAN KERJA, MENDORONG INOVASI LOKAL, DAN MENJAGA RESILIENSI EKONOMI. RPJMD INI MENEMPATKAN PENGEMBANGAN UMKM SEBAGAI SALAH SATU PRIORITAS UTAMA, DENGAN



STRATEGI YANG KOMPREHENSIF UNTUK MEMASTIKAN MEREKA DAPAT TUMBUH DAN BERKONTRIBUSI OPTIMAL. KOMITMEN KAMI TERCERMIN DALAM UPAYA-UPAYA BERIKUT:

1. PENINGKATAN AKSES PERMODALAN
2. PENINGKATAN KAPASITAS DAN KUALITAS PRODUK
3. PERLUASAN AKSES PASAR
4. PENDAMPINGAN LEGALITAS DAN KELEMBAGAAN

KAMI YAKIN, DENGAN DUKUNGAN PENUH INI, UMKM DI NGAWI TIDAK HANYA AKAN BERTAHAN TETAPI JUGA BERKEMBANG PESAT, MENJADI MOTOR PENGGERAK PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, SERTA MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN YANG LEBIH MERATA BAGI SELURUH MASYARAKAT.

8. **FRAKSI PDI PERJUANGAN MENDORONG PEMERINTAH DAERAH UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI.**
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA INI PENTING UNTUK MENDUKUNG PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DAN DAYA SAING DAERAH DI MASA DEPAN.

JAWABAN :

TERIMA KASIH SARAN DAN MASUKANNYA, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MERUPAKAN FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH, BAIK DALAM ASPEK PELAYANAN PUBLIK, INOVASI KEBIJAKAN, MAUPUN DAYA SAING EKONOMI. PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI PERAN VITAL UNTUK MENGEMBANGKAN SDM MELALUI INVESTASI BERKELANJUTAN DALAM



PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENINGKATAN KOMPETENSI. NAMUN DEMIKIAN DENGAN JUMLAH ASN YANG ADA DIBANDINGKAN DENGAN ALOKASI ANGGARAN YANG TERBATAS UNTUK PENGEMBANGAN SDM MENYEBABKAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA KURANG PROPORSIONAL.

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI BERKOMITMEN AKAN TERUS BERUPAYA MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DENGAN MEMPERHATIKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH.

9. FRAKSI PDI PERJUANGAN MEMINTA AGAR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DILAKUKAN SECARA TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN EFISIEN.

PEMERINTAH DAERAH HARUS MAMPU MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN DAERAH, SERTA MENGALOKASIKAN ANGGARAN SECARA TEPAT SASARAN UNTUK PROGRAM-PROGRAM PRIORITAS.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS MASUKANNYA, UNTUK MENGOPTIMALKAN PENDAPATAN, KAMI TELAH DAN AKAN TERUS MELAKUKAN HAL SEBAGAI BERIKUT:

1. DIGITALISASI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI UNTUK MEMUDAHKAN WAJIB PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM MELAKUKAN PEMBAYARAN SERTA MEMINIMALISIR KEBOCORAN PENERIMAAN
2. PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DAN RETRIBUSI MELALUI SOSIALISASI, EDUKASI, DAN PENGUATAN REGULASI, SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DAN



PELAKU USAHA UNTUK MEMENUHI KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SECARA TEPAT WAKTU DAN BENAR.

3. PEMUTAKHIRAN DATA DAN MEMPERLUAS BASIS OBJEK PAJAK DAN RETRIBUSI, TERUTAMA DARI SEKTOR-SEKTOR YANG BELUM TERGARAP MAKSIMAL SEPERTI SEKTOR PARIWISATA DAN JASA SERTA PEMANFAATAN ASET DAERAH MELALUI KERJASAMA PEMANFAATAN SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH

PENGALOKASIAN ANGGARAN AKAN DIPRIORITASKAN PADA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN YANG MEMILIKI INDIKATOR KINERJA YANG SMART YAITU; SPECIFIC (SPESIFIK), MEASURABLE (TERUKUR), ACHIEVABLE (DAPAT DICAPAI), RELEVANT (RELEVAN), DAN TIME-BOUND (TERIKAT WAKTU). SELAIN ITU JUGA MEMILIKI MEKANISME MONITORING SERTA EVALUASI YANG TRANSPARAN.

10. FRAKSI PDI PERJUANGAN MENEKANKAN PENTINGNYA PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN RPJMD. PEMERINTAH DAERAH HARUS MEMBUKA RUANG PARTISIPASI SELUAS-LUASNYA BAGI MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, DAN BERBAGAI ELEMEN LAINNYA. PARTISIPASI MASYARAKAT PENTING UNTUK MEMASTIKAN BAHWA RPJMD INI BENAR-BENAR MENCERMINKAN ASPIRASI DAN KEBUTUHAN MASYARAKAT.

JAWABAN :

TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN MASUKANNYA. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN MELALUI PENDEKATAN PARTISIPASI TERUS DILAKUKAN MELALUI



MUSRENBANG DESA, MUSRENBANG KECAMATAN, FORUM PERANGKAT DAERAH, MUSRENBANG KABUPATEN DENGAN MELIBATKAN TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, DAN BERBAGAI ELEMEN LAINNYA. SELAIN ITU PEMKAB NGAWI JUGA MEMBUKA RUANG ASPIRASI MASYARAKAT MELALUI APLIKASI SIPD-RI KEMENDAGRI. HAL INI DILAKUKAN AGAR PROGRAM-PROGRAM PEMERINTAH SELARAS MENJAWAB KEBUTUHAN MASYARAKAT.

11. TERKAIT RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI, FRAKSI PDI PERJUANGAN SANGAT APRESIASI UNTUK MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM AGAR DAPAT MENINGKATKAN IKLIM USAHA YANG LEBIH KONDUSIF BAGI PELAKU JASA KONSTRUKSI DAN JUGA DAPAT MENARIK INVESTOR AGAR DAPAT MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NGAWI YANG MUARANYA UNTUK KESEJAHTERAAN RAKYAT.

JAWABAN :

JAWABAN TELAH KAMI SAMPAIKAN PADA PENJELASAN FRAKSI GABUNGAN (PAN - DEMOKRAT) ROMAWI V NOMOR 6.



DEMIKIAN SELURUH MATERI JAWABAN EKSEKUTIF TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS RANPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029 DAN RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

MUDAH - MUDAHAN, PENJELASAN INI DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN UNTUK SELANJUTNYA DILAKUKAN PENDALAMAN BERSAMA, SEHINGGA RANPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029 DAN RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI DAPAT DITERIMA OLEH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG SAYA HORMATI.

AKHIRNYA KEPADA KETUA, WAKIL KETUA DAN SEMUA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT SERTA HADIRIN SEKALIAN, SAYA SAMPAIKAN TERIMA KASIH, ATAS KESEDIAANNYA MENGIKUTI PEMBACAAN JAWABAN EKSEKUTIF, TERHADAP PANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS RANPERDA TENTANG RPJMD KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029 DAN RANPERDA TENTANG PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

SELANJUTNYA, SAYA SEBAGAI BUPATI NGAWI JUGA MENYETUJUI RANPERDA INISIATIF DPRD TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.



SEMOGA DENGAN PETUNJUK ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA, PROSES PEMBAHASAN DAPAT BERJALAN DENGAN LANCAR DAN MEMBAWA MANFAAT BAGI MASYARAKAT NGAWI.

WASSALAMU'ALAIKUM, WARAHMATULLAHIWABARAKATUH...

NGAWI, 1 JULI 2025

BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO, S.T., M.H.





**PANITIA KHUSUS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI**

**LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN NGAWI
DALAM RANGKA PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029
DAN PENCABUTAN PERDA NOMOR 18 TAHUN 2013
TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Ngawi

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ngawi

Yang kami hormati Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau
yang mewakili

Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah, beserta Jajarannya Eksekutif,
rekan-rekan wartawan dan seluruh Undangan yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ngawi dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat, Nikmat dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi dalam keadaan sehat wal afiat.

Hadirin, Rapat Paripurna yang terhormat.

Terlebih dahulu perlu kami sampaikan terima kasih kepada Pimpinan Rapat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Laporan Panitia Khusus DPRD ini.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Sdr. Bupati yang telah menyampaikan Pengantar / penjelasan Ranperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dalam Rapat Paripurna kemarin.

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat.

Sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan Pansus terhadap Rancangan Perda yang merupakan materi pokok Rapat Paripurna ini, perlu kami sampaikan bahwa Panitia Khusus RPJMD dibentuk pada Rapat Paripurna tanggal 17 April 2025. Dan terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pansus Sdr. Yudho Ari Saputro dan Sdr. Supeno, S.Pd, M.M.

Selanjutnya kami laporkan hasil pembahasan Pansus RPJMD terhadap Rancangan Perda tentang RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029, sebagai berikut ;

1. Pembahasan diawali dengan rapat internal Pansus untuk pencermatan terhadap Ranperda yang diajukan Bupati tentang RPJMD Tahun 2025-2029.
2. Pembahasan Ranperda dilanjutkan bersama Tenaga Ahli dari Fakultas Hukum UNS Surakarta pada tanggal 25 s/d 27 Mei 2025.
3. Selanjutnya dilakukan rapat kerja bersama Kepala BAPPEDA dan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Ngawi tanggal 16 Juni 2025.
4. Mencermati materi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Pansus memberikan beberapa catatan sbb ;
 - a. Penyusunan RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 sudah disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
 - b. Konsideran Mengingat
Yaitu Dasar Hukum yang memberi kewenangan pembentukan Perda serta Dasar Hukum yang memerintahkan pembentukan Perda sehingga beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak termasuk kategori di atas dapat dihapus saja; seperti ;
 - No. 24 : Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik-Bangkalan-dan seterusnya.

- No. 31 : Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Selanjutnya agar disesuaikan penulisan Peraturan Perundang-undangan yang dicantumkan, lengkapi media pengundangannya (Lembaran Negara/Tambahan Lembaran Negara, atau Lembaran Daerah /Tambahan Lembaran Daerah-nya), kalau ada yang sudah diubah lengkapi dengan perubahannya;
- c. Materi muatan Ranperda.
- Secara umum, Raperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 *sudah sesuai* dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 12 tahun 2011, UU No. 23 th 2014, Perpres No. 87 th 2014, maupun Permendagri No. 80 Th 2015 beserta perubahannya, namun demikian perlu ada penyempurnaan menyangkut misalnya penggunaan bahasa Perundang-undangannya, tata tulis dsb khususnya Lampiran Raperda-nya.
- d. Menyangkut substansi materi dalam Ranperda sebagian besar sudah sesuai dengan : UU No 25 th 2004, UU No 23 th 2014, Permendagri No 86 Th 2017, Inmendagri No 2 th 2025, dan dokumen sektor lain yang memiliki keterkaitan.
- e. Dalam rangka memastikan target masing-masing indikator kinerja Daerah yang ditetapkan mohon diperhatikan kemampuan Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029

Hadirin Rapat Dewan yang terhormat,

Akhirnya sebagai penutup Laporan Pansus ini, Kami atas nama Pansus RPJMD DPRD Kabupaten Ngawi, yang mana dalam susunan keanggotaan Pansus terdiri dari semua unsur Fraksi dengan mengucapkan **Bismillahirrohmanirrohim**, dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2013 tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi.

Demikian bilamana ada kekhilafan dan kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ngawi, 1 Juli 2025
Panitia Khusus RPJMD
DPRD Kabupaten Ngawi
Ketua

YUDHO ARI SAPUTRO

BERITA ACARA

Nomor : 4 TAHUN 2025

Nomor : 07 TAHUN 2025

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN NGAWI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-07-2025), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU, dan
2. a. YUWONO KARTIKO (KING) : Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
b. KHOIRUL ANAM MU'MIN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
c. IMAM NASRULLOH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 yang diajukan PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah yang terlampir pada Berita Acara Ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), yang dilakukan PIHAK KEDUA.
3. Selanjutnya PIHAK KESATU telah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1), selaras dengan penyesuaian dan perubahannya.

4. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI,

YUWONO KARTIKO

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI,

PIHAK PERTAMA
BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

KHOIRUL ANAM MU'MIN
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI,


IMAM NASRULLOH

BERITA ACARA

Nomor : 5 TAHUN 2025

Nomor : 08 TAHUN 2025

PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD

KABUPATEN NGAWI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN
USAHA JASA KONTRUKSI

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-07-2025), kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU, dan
2. a. YUWONO KARTIKO (KING) : Kjetua DPRD Kabupaten Ngawi;
b. KHOIRUL ANAM MU'MIN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
c. IMAM NASRULLOH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi, yang diajukan PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah yang terlampir pada Berita Acara Ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), yang dilakukan PIHAK KEDUA. Selanjutnya PIHAK KESATU telah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka (1), selaras dengan penyesuaian dan perubahannya.

3. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) sesuai dengan hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan nomor registrasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI,

YUWONO KARTIKO

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI,

PIHAK PERTAMA

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HARSONO

KHOIRUL ANAM MU'MIN

WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN NGAWI,

IMAM NASRULLOH

BERITA ACARA

Nomor : 09 TAHUN 2025

Nomor : 6 TAHUN 2025

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DAN BUPATI

KABUPATEN NGAWI

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Juli tahun 2025 (01-07-2025), kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. a. YUWONO KARTIKO (KING) : Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
b. KHOIRUL ANAM MU'MIN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi;
c. IMAM NASRULLOH : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ngawi,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI yang diajukan oleh PIHAK KESATU untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah yang terlampir pada Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), sesuai dengan hasil fasilitasi dari Gubernur Jawa Timur.

3. PIHAK KEDUA akan menyampaikan Peraturan Daerah tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI Kepada Gubernur Jawa Timur untuk mendapatkan nomor registrasi.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 4 (empat) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

BUPATI NGAWI

ONY ANWAR HARSONO



PIHAK KESATU

KETUA DPRD
KABUPATEN NGAWI

YUWONO KARTIKO (KING)



WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN NGAWI

KHOIRUL ANAM MU'MIN

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN NGAWI

IMAM NASRULLOH





PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 06 TAHUN 2025

TENTANG

PERSETUJUAN PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF
DPRD KABUPATEN NGAWI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN
KEMUDAHAN INVESTASI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi, maka perlu memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Bidang Usaha Penanaman Modal

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Memperhatikan : Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 30 Juni dan 1 Juli 2025 mengenai :

1. Pengantar/penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ngawi pada Rapat Paripurna tanggal 30 Juni 2025.
2. Pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi pada Rapat Paripurna tanggal 30 Juni 2025.
3. Tanggapan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ngawi terhadap Pendapat Bupati pada Rapat Paripurna tanggal 1 Juli 2025.
4. Pendapat Akhir Bupati terhadap Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna tanggal 1 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD Kabupaten Ngawi tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal 1 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI





PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN NGAWI
NOMOR 05 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029 DAN RANPERDA TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG IJIN
USAHA JASA KONTRUKSI

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 154 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, serta dengan telah selesainya pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, maka perlu memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dan Ranperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi tentang persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dan Ranperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan RencanaPembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan DPRD Kabupaten Ngawi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi.

Memperhatikan : Pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ngawi tanggal 30 Juni s/d 1 Juli 2025 mengenai :

1. Pengantar/penjelasan Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dan Ranperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi, pada Rapat Paripurna tanggal 30 Juni 2025.
2. Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna tanggal 30 Juni 2025.
3. Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna tanggal 1 Juli 2025.
4. Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Ngawi atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dan Ranperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi pada Rapat Paripurna tanggal 1 Juli 2025.
5. Persetujuan dari seluruh Anggota DPRD Kabupaten Ngawi atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029 dan Ranperda Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi pada Rapat Paripurna tanggal 1 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Dengan Keputusan ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngawi, menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025-2029,
untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi
- KEDUA : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Ijin Usaha Jasa Kontruksi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
Pada tanggal : 1 Juli 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGAWI
Ketua,



YUWONO KARTIKO



BUPATI NGAWI

SAMBUTAN BUPATI NGAWI PADA PENUTUPAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN NGAWI

TANGGAL 1 JULI 2025

ASSALAMU'ALAIKUMWARAHMATULLAHIWABARAKATUH
SELAMAT PAGI, SALAM SEJAHTERA UNTUK KITA SEMUA

- YTH. BAPAK KETUA, WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN NGAWI BESERTA ANGGOTA;
- FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN NGAWI;
- SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI
BESERTA JAJARANNYA;

2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18
TAHUN 2013 TENTANG IJIN USAHA JASA
KONSTRUKSI; DAN
3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN
INVESTASI.

HAL INI SEBAGAI BUKTI BAHWA JALINAN
KERJASAMA DAN KEMITRAAN ANTARA EKSEKUTIF DAN
LEGISLATIF SENANTIASA TERJAGA SECARA HARMONIS
DAN BERKESINAMBUNGAN DALAM UPAYA
MEMBANGUN KABUPATEN NGAWI.

**RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG SAYA
HORMATI,**

TERIMA KASIH KAMI SAMPAIKAN KEPADA
MASING-MASING FRAKSI YANG MENGEMUKAKAN
PANDANGAN UMUM. SEMOGA PERATURAN DAERAH
YANG TELAH DITETAPKAN DAPAT DILAKSANAKAN
SECARA EFEKTIF DAN MEMBERIKAN MANFAAT BAGI
MASYARAKAT KABUPATEN NGAWI.

- KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DAN CAMAT SE KABUPATEN NGAWI;
- HADIRIN DAN SEGENAP TAMU UNDANGAN YANG
BERBAHAGIA.

UNTUK MENUTUP ACARA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI INI, PERKENANKAN KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT ATAS KERJASAMA DAN DUKUNGAN KEPADA EKSEKUTIF DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN NGAWI.

BERKAT KEBERSAMAAN YANG TERBANGUN AKHIRNYA 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN DAERAH EKSEKUTIF DAN 1 (SATU) RANCANGAN PERATURAN DAERAH INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI DAPAT DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH PADA HARI INI YAITU :

1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2025-2029;

DEMIKIAN SAMBUTAN INI KAMI SAMPAIKAN,
SEMOGA ALLAH YANG MAHA ESA SELALU MEMBERI
PETUNJUK DAN KEKUATAN KEPADA KITA DALAM
BEKERJA UNTUK MEWUJUDKAN NGAWI YANG LEBIH
BAIK.

TERIMA KASIH

WASSALAMU'ALAIKUM WR . WB.

BUPATI NGAWI,



H. ONY ANWAR HARSONO




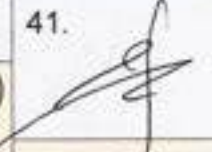
DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN NGAWI

PERIODE 2024 - 2029

Acara : Paripurna Tanggapan Bapemperda Terhadap Pendapat Bupati Tentang Ranperda Inisiatif DPRD Dan Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Serta Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Dan 2 (Dua) Ranperda Dari Eksekutif.

Hari / Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025.

NO	N A M A	JABATAN	PARTAI	TANDA	TANGAN
1.	Dr. H. YUWONO KARTIKO, S.E., M.M (KING)	KETUA	PDIP	1. 	
2.	H. KHOIRUL ANAM MU'MIN S.H, M.H.I.	WAKIL KETUA	PKB		2.
3.	IMAM NASRULLOH, S.E., M.Si.	WAKIL KETUA	GOLKAR	3. 	
4.	FELIGIA AGIT HENDIADI, S.H., M.H.	ANGGOTA	PDIP		4. 
5.	EKO TRIYANTO, S.E., M.M.	ANGGOTA	PDIP	5.	
6.	Hj. WIWIK HARIYANTI.	ANGGOTA	PDIP		6. 
7.	HELMI MASULIN, S.H.	ANGGOTA	PDIP	7. 	
8.	ARIEF SLAMET PRASETYO, S.Kep. (MUMUN)	ANGGOTA	PDIP		8. 
9.	SUNARJATI	ANGGOTA	PDIP	9. 	
10.	S O J O	ANGGOTA	PDIP		10. 
11.	INAYA AMALYA SALMA	ANGGOTA	PDIP	11. 	
12.	H. SUDIRMAN, Sos., M.M.	ANGGOTA	PDIP		12.
13.	PUJO WAHONO	ANGGOTA	PDIP	13.	
14.	HERU KUSNINDAR.	ANGGOTA	PDIP		14.
15.	SUJI ASTUTIK, S.Pd.	ANGGOTA	PDIP	15. 	
16.	H. ARIS SULAWAN	ANGGOTA	PDIP		16. 
17.	AGUNG REZKINA PRAMESTI, S.I.Kom.	ANGGOTA	PDIP	17. 	
18.	DIANDRA NOVY WINALDA, S.H.	ANGGOTA	PDIP		18. 
19.	TRI SUPRIH WARDOYO, S.E.	ANGGOTA	PDIP	19. 	
20.	BAMBANG SRI SALOKO, S.Si.	ANGGOTA	PDIP		20. 

NO	N A M A	JABATAN	PARTAI	TANDA	TANGAN
21.	Drs. SOERADJI, M.M.	ANGGOTA	PDIP		21. 
22.	ANDRI RAGILS LESTARI, S.Pd., M.H..	ANGGOTA	PDIP	22. 	
23.	NURI KARIMATUNNISA, S.Si.	ANGGOTA	PKB		23. 
24.	H. SUROJOGO PBSH, S.E.	ANGGOTA	PKB	24. 	
25.	H. KALAM, S.H.	ANGGOTA	PKB		25. 
26.	WIWIK PRIYANI	ANGGOTA	PKB	26. 	
27.	H. ANAS HAMIDI, S.H.	ANGGOTA	PKB		27. 
28.	S U N T O R O	ANGGOTA	GERINDRA	28.	
29.	DWI NURACHMAD RIYADI BASUKI.	ANGGOTA	GERINDRA		29. 
30.	ERNING YULIASNUNIK	ANGGOTA	GERINDRA	30. 	
31.	YUDHO ARI SAPUTRO	ANGGOTA	GERINDRA		31. 
32.	RISKI WAHYU NUGROHO, S.Kom.	ANGGOTA	GERINDRA	32. 	
33.	SARJONO, S.Pd.	ANGGOTA	GOLKAR		33.
34.	Drs. H. AMIN SUNARTO, M.Si.	ANGGOTA	GOLKAR	34. 	
35.	H. WINARTO, S.H.	ANGGOTA	GOLKAR		35.
36.	SUPRIANTO	ANGGOTA	GOLKAR	36. 	
37.	Hj. HANANI MUHAROMAH	ANGGOTA	PKS		37. 
38.	NUR KHOLIS, S.Pd., Si.	ANGGOTA	PKS	38. 	
39.	H. HARYANTO, S.IP., M.M.	ANGGOTA	PKS		39. 
40.	SRI HARYANTININGSIH, S.E.	ANGGOTA	HANURA	40.	
41.	SUPENO, S.Pd., M.M.	ANGGOTA	PAN		41. 
42.	Dr. H. GUNADI ASH CIDIQ, S.Pd., M.Pd.	ANGGOTA	PAN	42. 	
43.	H. HARIS AGUS SUSILO, S.H.	ANGGOTA	DEMOKRAT		43. 
44.	AROFIK, S.M.	ANGGOTA	DEMOKRAT	44. 	

DAFTAR HADIR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN NGAWI

Acara : Paripurna Tanggapan Bapemperda Terhadap Pendapat Bupati Tentang Ranperda Inisiatif DPRD Dan Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Serta Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Dan 2 (Dua) Ranperda Dari Eksekutif.

Hari / Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025.

NO	N A M A	INSTANSI	TANDA	TANGAN
1.		Sekretariat Daerah		1.
2.		Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan	2.	
3.		Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan		3.
4.	Donardi	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, SDM dan Keuangan	4.	
5.	Suparna	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat		5.
6.		Asisten Perekonomian dan Pembangunan	6.	
7.		Asisten Administrasi		7.
8.	A Roy R.	Bagian Tata Pemerintah	8.	
9.	Fuad	Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan		9.
10.	Suparna	Bagian Kesejahteraan Rakyat	10.	
11.		Bagian Administrasi Pembangunan		11.
12.	Diari	Bagian Perekonomian	12.	
13.	Adit	Bagian Organisasi		13.
14.	Suyanto	Bagian Umum	14.	
15.		Bagian Hukum		15.
16.	Budi A w	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	16.	
17.	Eko Sunarto	Inspektorat		17.
18.	Sahar Hedy	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	18.	
19.	ABUS S	Badan Keuangan		19.
20.	Indah. Kurniawati	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	20.	
21.	PRIMA YUDA	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		21.
22.	Epru Indrasari	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	22.	
23.	R Didi K U	Sat. Pol PP		23.
24.		RSUD Dr. Soeroto Ngawi	24.	

DAFTAR HADIR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

Acara : Paripurna Tanggapan Bapemperda Terhadap Pendapat Bupati Tentang Ranperda Inisiatif DPRD Dan Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Serta Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Dan 2 (Dua) Ranperda Dari Eksekutif.



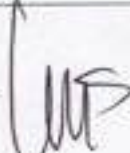



Hari / Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025.

1.	Mahyuli Tri Axi	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan		1.
2.	Nirwen Purnawijaya	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	2.	
3.	Noor Maam	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		3.
4.	ARFIN	Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Tenaga Kerja	4.	
5.	Risang D.	Dinas Koperasi, Usaha dan Menengah		5.
6.	MOH. SADI	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.	
7.	SUPARNO	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		7.
8.	NHOM KRI	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	8.	
9.	Totok S	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu		9.
10.	AGUS SUTRISNO	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.	
11.	Tulung	Dinas Kesehatan		11.
12.	YUDO N	Dinas Perikanan Dan Peternakan	12.	
13.	MATTHIA	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		13.
14.	SUNARSO	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.	
15.		Dinas Lingkungan Hidup		15.
16.	Triana WK	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.	
17.		Dinas Sosial		17.
18.	Zaini Anfi	Dinas Perhubungan	18.	

DAFTAR HADIR KECAMATAN DI KABUPATEN NGAWI

Acara : Paripurna Tanggapan Bapemperda Terhadap Pendapat Bupati Tentang Ranperda Inisiatif DPRD Dan Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Serta Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Dan 2 (Dua) Ranperda Dari Eksekutif.

Hari / Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025.





NO	NAMA	KECAMATAN	TANDA	TANGAN
1.	Eka Mahendra S	SINE	1. 	
2.		NGRAMBE		2. 
3.	MOCHTOR	JOGOROGO	3. 	
4.	Emy Retno S.	KENDAL		4. 
5.	Nawangsah	GENENG	5. 	
6.	Ranang S	GERIH		6. 
7.	HARI: N.	KWADUNGAN	7. 	
8.		PANGKUR		8. 
9.	TEOUT-S	KARANGJATI	9. 	
10.	NOVAN K.	BRINGIN		10. 
11.	HERY PUTRA	PADAS	11. 	
12.	Bidik w	KASREMAN		12. 
13.	Rebrante	NGAWI	13. 	
14.	Dedi	PITU		14. 
15.	Mishi	PARON	15. 	
16.	ALI PUSPA EDI	KEDUNGALAR		16. 
17.	SONY M	WIDODAREN	17. 	
18.	Ani	KARANGANYAR		18. 
19.	A	MANTINGAN	19. 	

DAFTAR HADIR UNDANGAN

Acara : Paripurna Tanggapan Bapemperda Terhadap Pendapat Bupati Tentang Ranperda Inisiatif DPRD Dan Jawaban Bupati Terhadap Pandangan Umum Fraksi - Fraksi DPRD Serta Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Inisiatif DPRD Dan 2 (Dua) Ranperda Dari Eksekutif.

Hari / Tanggal : Selasa, 01 Juli 2025.

NO	NAMA	UNDANGAN	TANDA	TANGAN
1.	Mur wahyudi	TA. F GAS		1.
2.	Foxy Narwoyo	TA. F. PDIP	2.	
3.	ky. Yuni Sidi	Dwp kab		3.
4.	Adinda	kominfo	4.	
5.	Sheila F	- " -		5.
6.	ANBBITA	TA	6.	
7.	Purjijanto	Bank Syariah Ngawi		7.
8.	ERHADIATI - R	PDAM	8.	
9.	Lilis Y. W	PDAM		9.
10.	RR. Sindang Sri S	PKK Kab.	10.	
11.	Renti Tri H	PKK kab		11.
12.	Hendy Arief W	Bank Jomb	12.	
13.	Am. Erdang Sumarsono	DWP kab		13.
14.	Ratih Dardz N	RSUD dr. Soesoto	14.	
15.	Anay A	Permda sri		15.
16.	Eko juwito	TA. FRG	16.	
17.	KRISTIANTO	POLRES NGAWI		17.
18.	RAYHAM	POLRES NGAWI	18.	
19.	EKA	POLRES NGAWI		19.
20.	Ani	Wion	20.	
-				

NO	N A M A	UNDANGAN	TANDA	TANGAN
21.	tuni			21. 
22.	Agung	Tepan	22. 	
23.	ARIE	Beran		23. 
24.	Ari Hermawan	Media	24. 	
25.				25.
26.			26.	
27.				27.
28.			28.	
29.				29.
30.			30.	
31.				31.
32.			32.	
33.				33.
34.			34.	
35.				35.
36.			36.	
37.				37.
38.			38.	
39.				39.
40.			40.	